



**Drs. MUH. SALEH, M.Si**

**Pj. BUPATI LUWU**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2023**



# KATA PENGANTAR

## **Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan mandiri Dalam Nuansa Religi maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu tahun 2023. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2023 sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana kegiatan.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023 yang juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada pemerintah baik Pusat/Provinsi, Kabupaten/Kabupaten lain serta lebih penting lagi bagi pelaku – pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala/permasalahan yang dihadapi Kabupaten Luwu. Sehingga bagi Pemerintah Pusat atau Provinsi, dalam perumusan kebijakan strategis perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan Kabupaten Luwu, kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Sementara bagi Kabupaten/Kabupaten lain melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2023 ini, dapat dijadikan komparasi/pembandingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masing–masing. Sedangkan bagi pelaku–pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu, dapat mencermati kendala–kendala yang ada dalam penyelenggaraan program/kegiatan selama ini, mengetahui penyebab kegagalan suatu program/kegiatan dan merumuskan langkah– langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa–masa datang.



Dengan memanjatkan rasa syukur dan mohon ridho kepada Allah SWT, semoga segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu untuk Menuju Kabupaten Luwu lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya saing dapat tercapai.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Belopa, 15 Maret 2024

**Pj. BUPATI LUWU**



**MUH. SALEH**



# Daftar Isi

## KATA PENGANTAR

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1-2
B. Gambaran Umum .....	2
Kondisi Geografis .....	2-5
Kondisi Demografis .....	5
C. Kondisi Perekonomian .....	5
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB .....	5-8
PDRB Perkapita .....	9
Tingkat Kemiskinan .....	9-10
Gini Rasio .....	11
D. Kondisi Pemerintahan .....	12-15
E. Kondisi Pegawai Negeri Sipil .....	15-16
F. Sistematika Lakip .....	16-17

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	18-32
----------------------------------	-------

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2023 .....	34-37
1. Capaian Kinerja Misi 1 .....	37-43
2. Capaian Kinerja Misi 2 .....	43-49
3. Capaian Kinerja Misi 3 .....	49-55
4. Capaian Kinerja Misi 4 .....	55-58
5. Capaian Kinerja Misi 5 .....	58-62
6. Capaian Kinerja Misi 6 .....	62-65
7. Capaian Kinerja Misi 7 .....	65-67
8. Capaian Kinerja Misi 8 .....	67-70
9. Capaian Kinerja Misi 9 .....	70-73
10. Capaian Kinerja Misi 10 .....	73-75



B. Realisasi Anggaran.....	76
1. Pendapatan Asli Daerah.....	76-77
2. Belanja Daerah.....	77-78

## BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah Perbaikan



## Ringkasan Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan. Tahun 2023 merupakan tahun empat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan guna mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dimana Laporan Kinerja Kabupaten Luwu tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan tahun 2022 di dalam RPJMD 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Indikator Kinerja Kabupaten Luwu, pada tahun 2022 capaiannya secara umum sudah sangat baik. Capaian-capaian ini kemudian menjadi salahsatu tolak ukur capaian Kepala Daerah selama periode masa jabatannya yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode lima tahun mendatang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 mendatang.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun setelah tahun anggaran berakhir menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai





perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## B. GAMBARAN UMUM

### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota kabupaten adalah Kota Belopa. Ibukota Kabupaten Luwu sebelumnya adalah Kota Palopo namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu, maka Ibu kota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sebagai pusat pemerintahan akibat hal tersebut maka wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah yang dipisahkan oleh wilayah Kota Palopo yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah perbatasan Kabupaten Luwu berbatasan dengan:

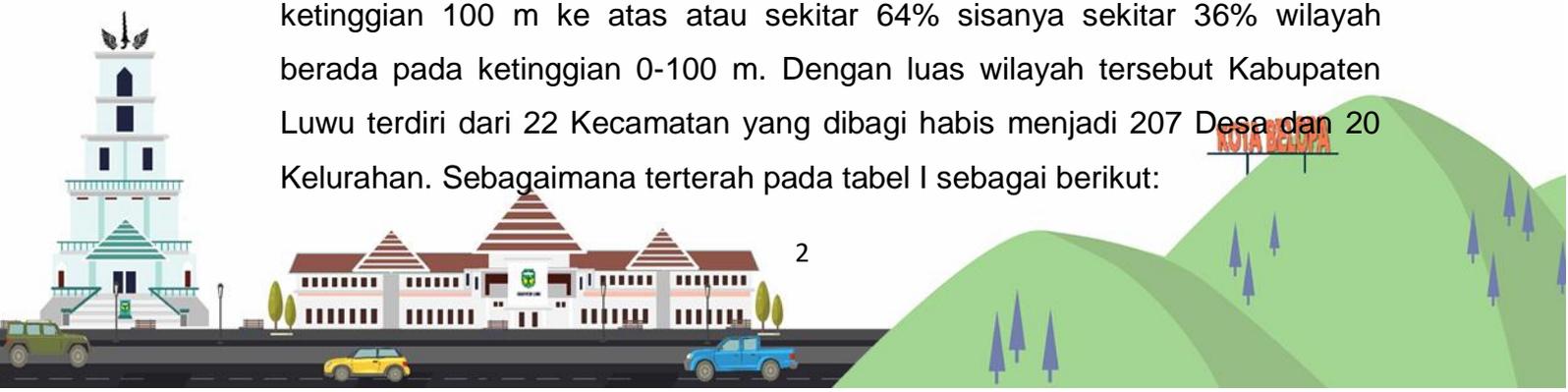
Sebelah Utara : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kota Palopo

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja utara dan Kabupaten Enrekang

Luas wilayah Kabupaten Luwu tercatat 3.000,25 km<sup>2</sup>, menurut ketinggian daerah sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu berada di ketinggian 100 m ke atas atau sekitar 64% sisanya sekitar 36% wilayah berada pada ketinggian 0-100 m. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Sebagaimana tertera pada tabel I sebagai berikut:





**Tabel I.1** Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1.	Larompong Selatan	9	1
2.	Larompong	12	1
3.	Suli Barat	7	1
4.	Suli	12	1
5.	Belopa	5	4
6.	Belopa Utara	6	2
7.	Bajo	11	1
8.	Bajo barat	9	-
9.	Latimojong	12	-
10.	Basse Sangtempe	12	-
11.	Basse Sangtempe Utara	12	-
12.	Kamanre	7	1
13.	Ponrang Selatan	12	1
14.	Ponrang	8	2
15.	Bua Ponrang	9	1
16.	Bua	14	1
17.	Walentrang	8	1
18.	Walentrang Utara	10	1
19.	Walentrang Timur	8	-
20.	Walentrang Barat	6	-
21.	Lamasi	9	1
22.	Lamasi Timur	9	-

*Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2024*

Sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat wilayah kecamatan yang belum memiliki wilayah administrasi kelurahan didalamnya. Adapun luas wilayah masing-masing seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:



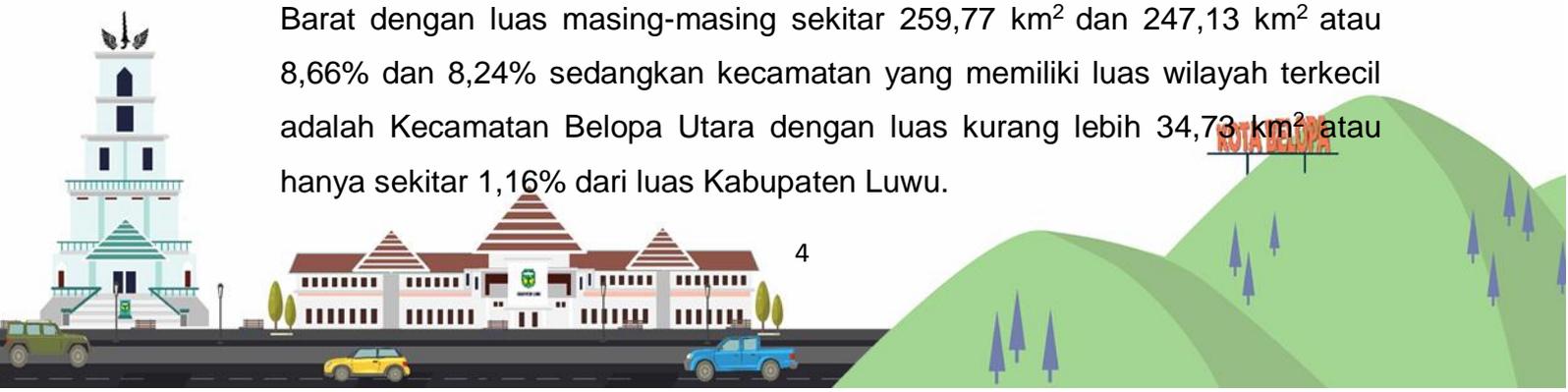


**Tabel I.2** Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131,00	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,50	5,12
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,1
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,8
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,60	3,15
18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
Jumlah			<b>207</b>	<b>20</b>	<b>3000,25</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2024

Tabel diatas menggambarkan luas wilayah masing-masing kecamatan, dimana Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 15,59% dari luas seluruh Kabupaten Luwu, menyusul Kecamatan Walenrang Utara dan Kecamatan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km<sup>2</sup> dan 247,13 km<sup>2</sup> atau 8,66% dan 8,24% sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 1,16% dari luas Kabupaten Luwu.





## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2022 sebanyak 380.697 jiwa yang terdiri atas 197.185 jiwa penduduk Laki-Laki dan 183.494 jiwa penduduk Perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu tahun 2023 mencapai 127 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Belopa Utara dengan kepadatan sebesar 546 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah di Kecamatan Latimojong sebesar 14 jiwa/km<sup>2</sup>.

## C. KONDISI PEREKONOMIAN

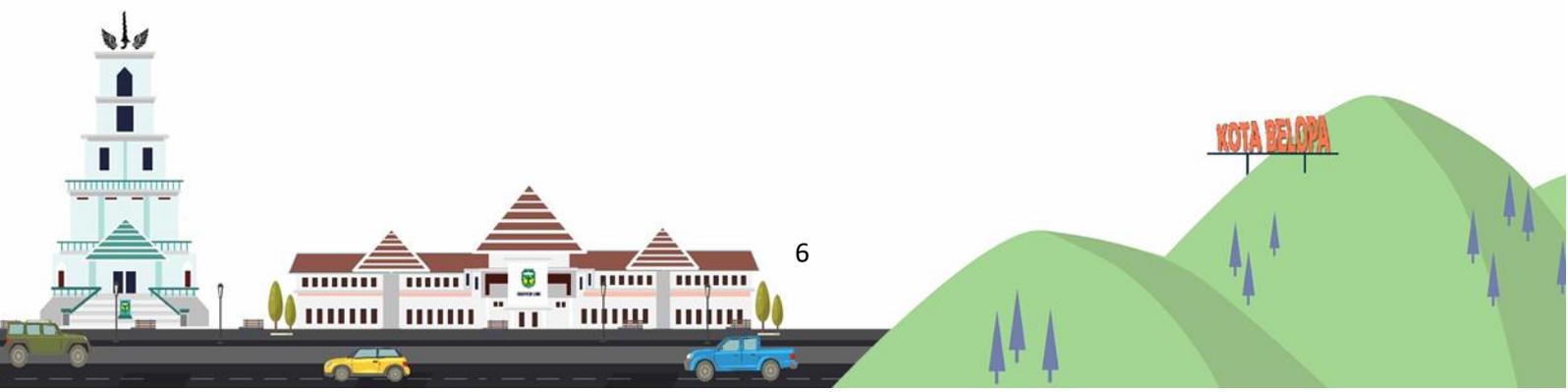
### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Sasaran pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan proses jangka panjang dari suatu pemerintahan dengan sasaran utama proses tersebut adalah bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Meskipun Kabupaten Luwu yang sekarang adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo namun potensi perekonomiannya masih cukup tinggi. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 21,76 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,78 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19,98 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi di beberapa lapangan usaha (inflasi). Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 11,04 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 11,67 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,64 persen,. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha





menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.





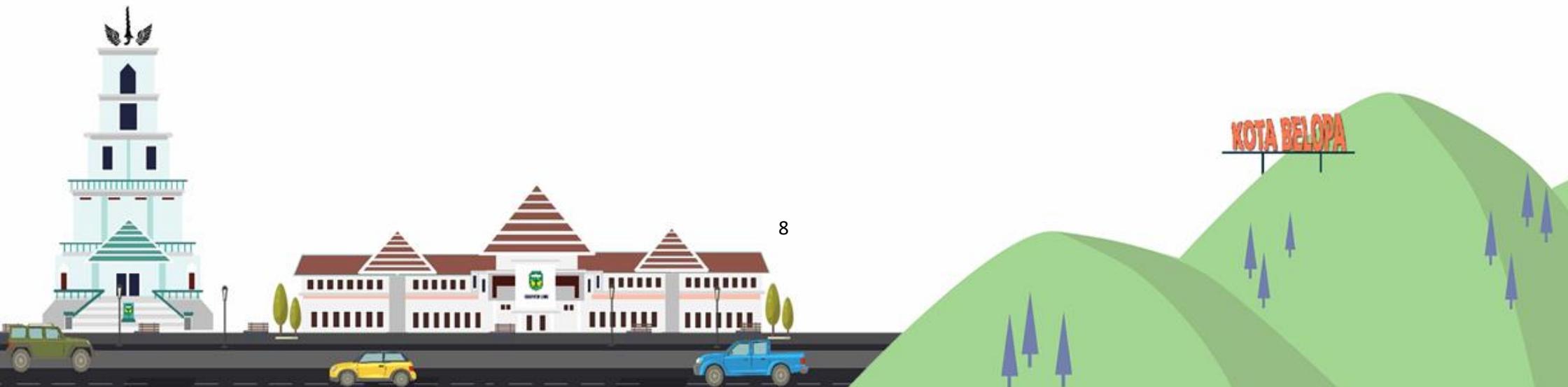
**Tabel I.3** PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.747,14	4 762,22	5 014,21	5 265,65	5.386,40
B	Pertambangan dan Penggalian	227,42	231,82	240,57	250,95	275,43
C	Industri Pengolahan	457,47	426,68	459,38	480,11	501,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,93	12,60	13,27	13,88	15,71
E	Pengadaan Air	1,56	1,68	1,70	1,86	1,92
F	Konstruksi	823,64	839,60	854,23	934,48	1.081,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor	1.173,45	1 166,66	1 279,60	1 391,38	1.531,72
H	Transportasi dan Pergudangan	81,81	73,77	79,51	92,69	100,82
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	72,56	69,70	76,85	90,36	101,23
J	Informasi dan Komunikasi	309,75	349,74	377,13	398,98	433,68
K	Jasa Keuangan	136,65	144,48	157,13	158,32	153,56
L	Real Estate	572,49	144,48	642,74	673,49	711,02
M,N	Jasa Perusahaan	2,56	2,45	2,55	2,89	3,17



Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	446,86	446,08	473,06	471,70	489,24
P	Jasa Pendidikan	354,86	380,69	399,93	416,22	450,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278,88	313,27	346,24	367,72	393,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	29,93	28,88	31,27	34,01	37,26
<b>PDRB Luwu</b>		<b>9.728,96</b>	<b>9 855,91</b>	<b>10449,75</b>	11 044,67	11.668,14

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2024



## 2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah meskipun belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil. Berdasarkan perhitungan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu pada tahun 2016 sebesar Rp33.573 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya terus meningkat menjadi Rp. 36.603 miliar pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar Rp40.200 miliar, dan pada tahun 2019 mencapai Rp43.250 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,78 persen pertahun.

Untuk PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan meskipun pertumbuhan lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku namun dari tahun 2018-2021 juga terus meningkat. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Luwu tahun 2021 adalah Rp.44.880.190,-, tumbuh 2,09% dari tahun 2020 yaitu Rp.43.960.000,-. Sedangkan ADHK diperkirakan tumbuh sebesar 0,05%, yaitu dari Rp.27.030.000,- menjadi Rp.27.044.500,-. Nilai PDRB perkapita ADHB dan ADHK tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

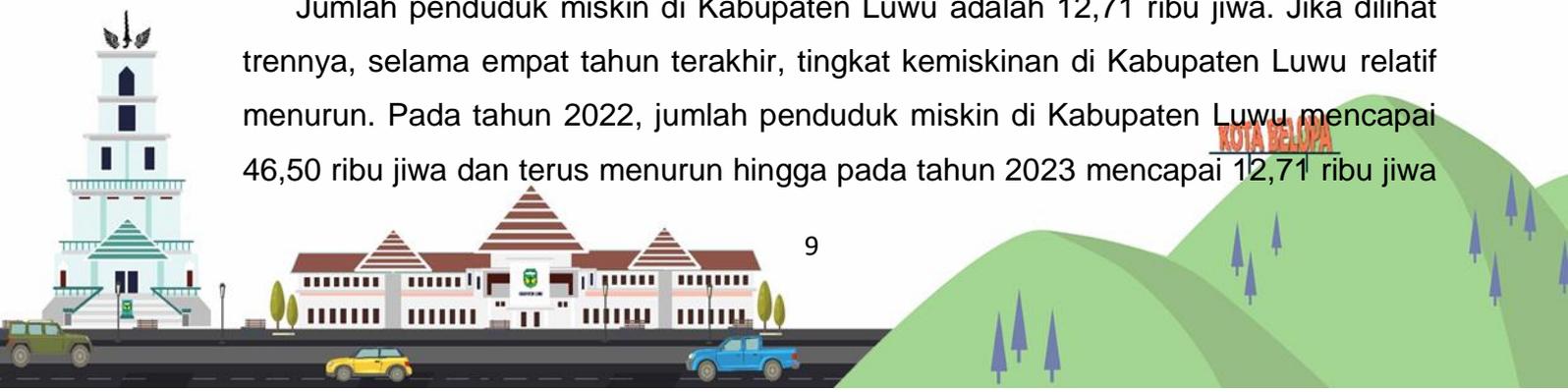
**Tabel I.4** PDRB Perkapitan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	40.200,00	9,83	25.487,00	5,99
2019	43.250,00	7,59	26.874,00	5,44
2020	43.960,00	1,64	27.030,00	0,59
2021	44.880,19	2,09	27.044,50	0,05
2021	54.029,00		29.863,00	

Sumber : BPS Kab. Luwu

## 3. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 12,71 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 46,50 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2023 mencapai 12,71 ribu jiwa





dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu, Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Gambar 1.1.** Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2023

Kabupaten/kota	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kepulauan Selayar</b>	17,36	17,04	16,93	16,74	16,89
<b>Bulukumba</b>	30,49	30,00	31,31	31,29	30,65
<b>Bantaeng</b>	16,91	16,84	17,78	17,22	17,49
<b>Jeneponto</b>	54,05	53,24	52,35	50,59	48,32
<b>Takalar</b>	25,93	25,38	24,6	24,75	25,01
<b>Gowa</b>	57,99	57,68	58,66	57,96	59,10
<b>Sinjai</b>	22,27	22,06	21,69	21,67	21,14
<b>Maros</b>	34,85	34,62	34,11	33,9	34,96
<b>Pangkep</b>	47,07	47,12	48,4	47,53	46,06
<b>Barru</b>	14,92	14,44	15,18	14,73	14,88
<b>Bone</b>	76,25	81,33	79,64	80,34	80,12
<b>Soppeng</b>	16,45	17,23	17,27	17,21	17,21
<b>Wajo</b>	29,73	27,48	26,22	26,75	27,54
<b>Sidrap</b>	14,44	15,36	15,25	15,56	15,75
<b>Pinrang</b>	31,85	33,56	33,51	33,64	34,23
<b>Enrekang</b>	25,40	25,25	26,13	26,15	26,97
<b>Luwu</b>	46,18	46,04	46,26	46,5	47,67
<b>Tana Toraja</b>	26,87	28,41	29,33	29,31	30,23
<b>Luwu Utara</b>	42,48	42,20	43,15	42,29	40,79
<b>Luwu Timur</b>	20,83	20,82	20,99	20,89	21,57
<b>Toraja Utara</b>	28,64	27,88	28,39	27,79	29,14
<b>Makassar</b>	65,12	69,98	74,69	71,83	80,32
<b>Pare-Pare</b>	7,62	7,96	7,93	8,01	7,98
<b>Palopo</b>	14,37	14,71	15,21	14,78	14,85
<b>Sulawesi selatan</b>	<b>767,80</b>	<b>776,83</b>	<b>784,98</b>	<b>777,44</b>	<b>788,85</b>

Sumber Data : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024



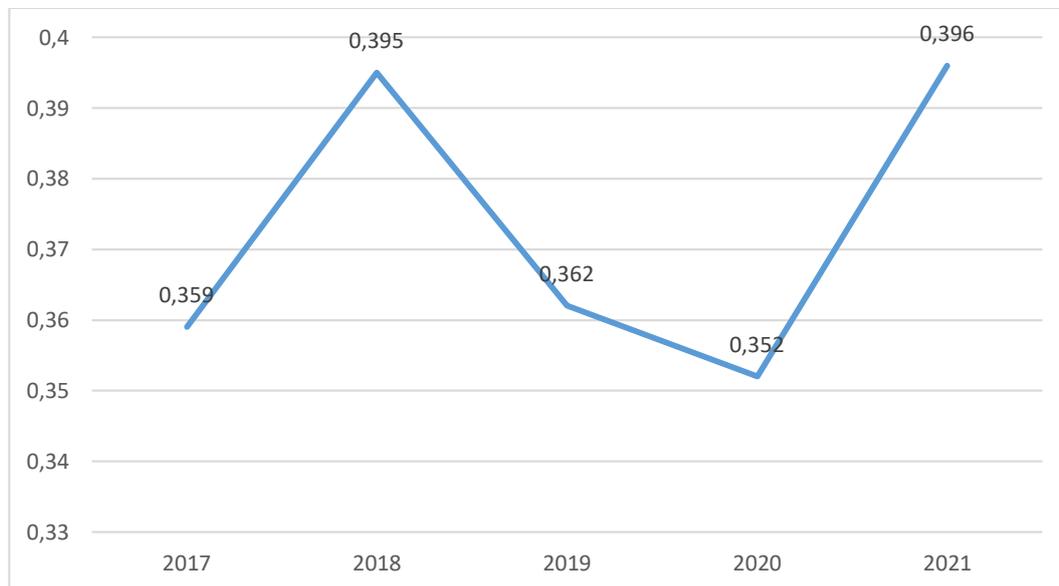
#### 4. Gini Rasio

Gini Ratio merupakan alat ukur dalam menentukan seberapa besar ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah pada periode tertentu, dengan nilai gini rasio Kabupaten Luwu sebesar 0,396. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, maka semakin besar nilai rasio Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran dalam suatu wilayah. Besaran nilai gini rasio kabupaten Luwu masih dapat dikategorikan kedalam kondisi ketimpangan sedang. Skala indeks gini rasio terdiri dari:

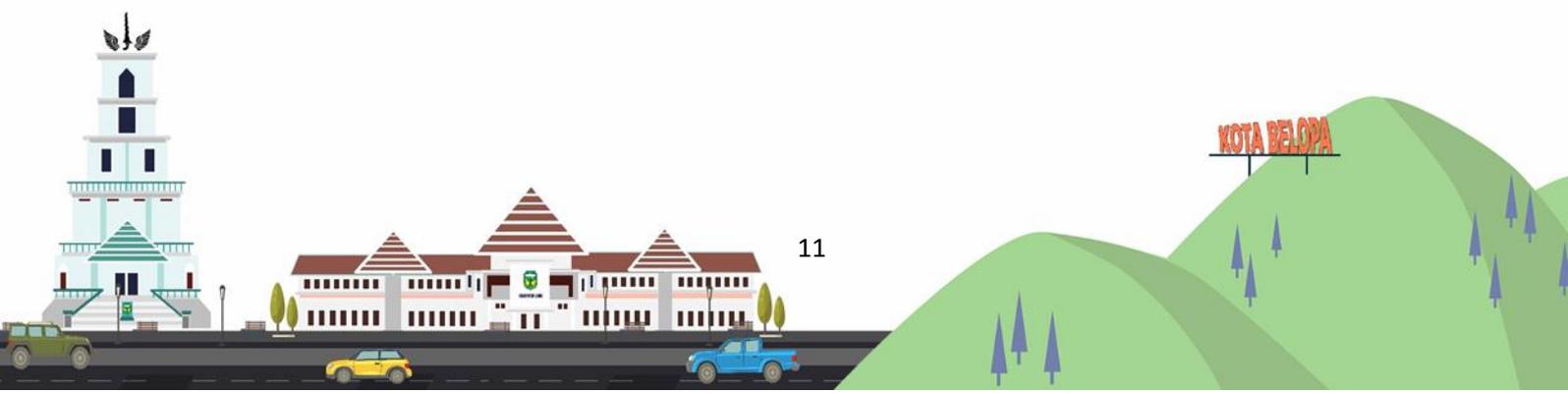
- ✓ Ketimpangan rendah bila gini ratio  $\leq 0,30$
- ✓ Ketimpangan sedang bila gini ratio antara 0,30 hingga 0,50
- ✓ Ketimpangan tinggi bila gini ratio  $\geq 0,50$

Berdasarkan skala gini ratio, maka gini ratio Kabupaten Luwu selama tahun 2017-2021 berada pada angka  $\geq 0,30$  dan lebih  $\leq 0,50$  sehingga mengindikasikan ketimpangan pendapatan tergolong skala sedang.

**Gambar 1.2.** Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun Maret 2020



Sumber : BPS Kab. Luwu





#### D. KONDISI PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
12. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Pertanahan
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
19. Dinas Perhubungan
20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



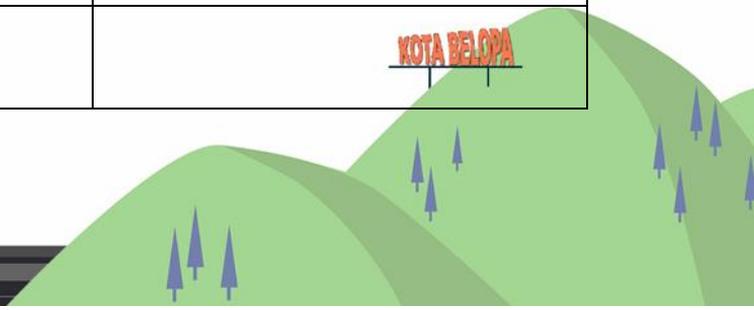


25. Dinas Perikanan
26. Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan
27. Pertanian
28. Dinad Perdagangan
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
30. Badan Keuangan dan Aset Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35. RSUD Batara Guru
36. Kecamatan-Kecamatan

**Tabel I.5** Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah

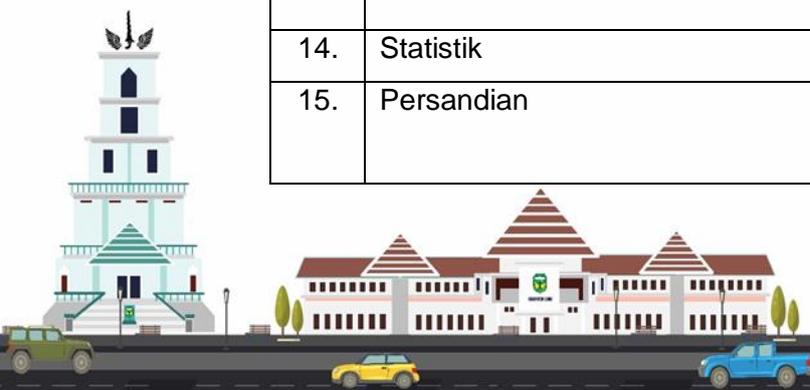
<b>NO.</b>	<b>URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2.	Kesehatan	Pengelolaan UKP & UKM dan Rujukan Tingkat kabupaten
3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten & Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Imprastruktur pada Permukiman di Daerah
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan gangguan & Ketertiban Umum Penanganan PERDA & PERBUB
6.	Sosial	
<b>NO.</b>	<b>URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Tenaga Kerja	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

KOTA BELOPA





NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
3.	Pangan	
4.	Pertanahan	
5.	Lingkungan Hidup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk. 2. Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi & edukasi (KIY) pengendalian Penduduk KB keahrifan Budaya lokal
9.	Perhubungan	1. Penetapan rencana induk LLAJ 2. Penerbitan Izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas daerah 3. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan Helikopter
10.	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12.	Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan & Pengembangan Organisasi Kepemudaan & Keolahragaan
14.	Statistik	Penyelenggaraan statistic sektoral
15.	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi





NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
		Pemerintah
16.	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi & pembinaan lembaga adat
17.	Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan & Pembudayaan gemar membaca
18.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip
NO.	URUSAN PILIHAN	KETERANGAN
1.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan & penyelenggaraan TPI & pemberdayaan nelayan kecil
2.	Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategi pariwisata & destinasi pariwisata
3.	Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana & pengembangan sarana pertanian
4.	Perdagangan	Pembangunan & pengelolaan sarana distribusi perdagangan
6.	Perindustrian	Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
7.	Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi dan penataan kesebaran penduduk yang berasal dari satu daerah

## E. KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian atau "SIMPEG" Tahun 2022 sebanyak 5537 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2021 orang dan perempuan sebanyak 3516 orang.



**Tabel I.6** Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2023

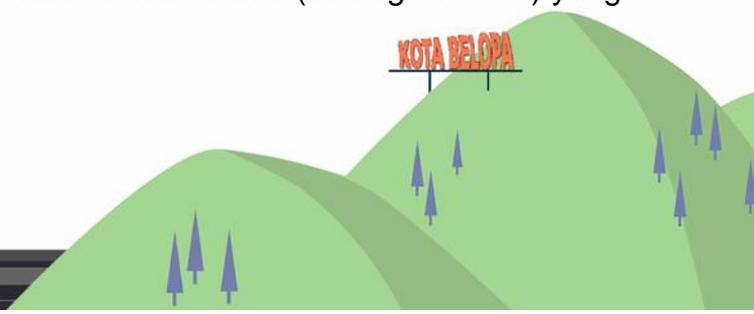
NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD/Sederajat	3		3
2.	SLTP/Sederajat	13		13
3.	SLTA/Sederajat	278	142	420
4.	Diploma I	1	9	10
5.	Diploma II	17	38	55
6.	Diploma III	61	321	382
7.	Diploma IV	14	80	94
8.	Strata I	1298	2655	3953
9.	Strata II	202	192	394
10.	Strata III	1		1
	<b>Jumlah</b>	<b>1888</b>	<b>3437</b>	<b>5325</b>

## F. SISTIMATIKA LAKIP

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana kinerja (*Performance Plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2023 sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.





## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **a. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2023**

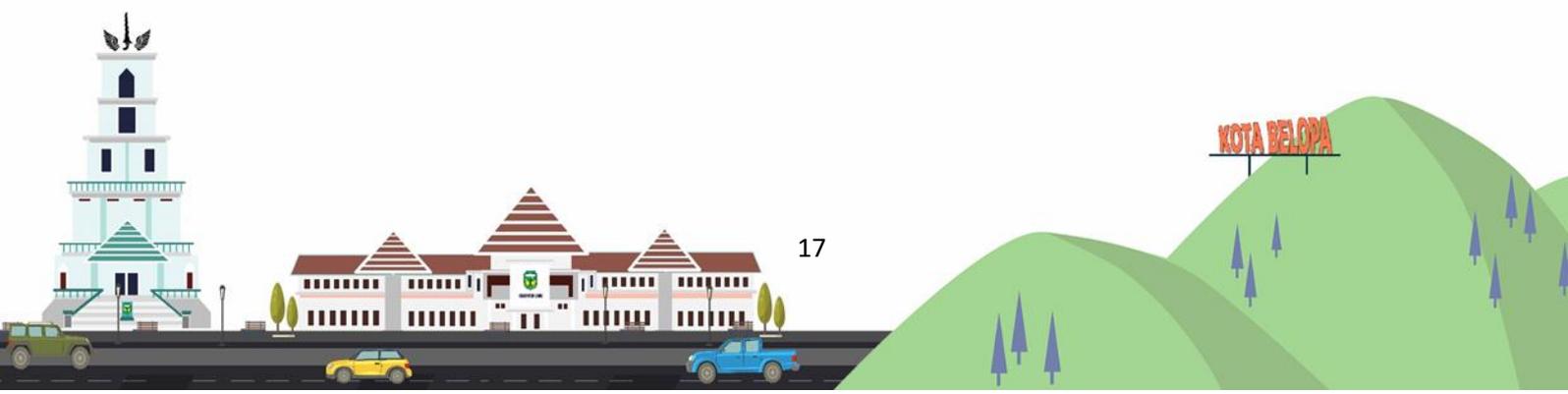
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini disajikan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

## **Bab IV Penutup**

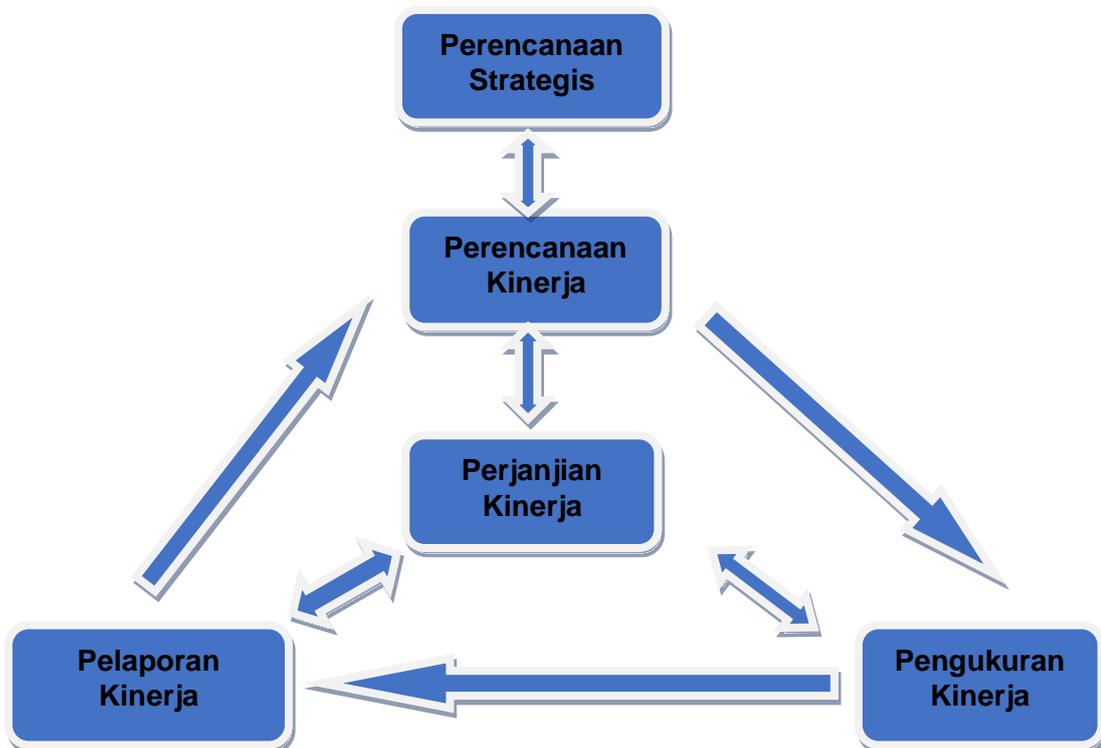
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.



Gambar 2.1 Hubungan Antara Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja

Sesuai skema di atas, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024. LKjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan





Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019 – 2024 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Luwu dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan good and clean governance, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-5 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut :





Tabel. 2.2

**Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sesuai RPJMD Periode 2019-2024**

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2023
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	<b>T1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih</b>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	B
		S1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	2. Nilai SAKIP Kabupaten	CC	BB
		S1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	<b>T2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	4. Indeks Pembangunan Manusia	70,39	71,40
		S2.1 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	5. Indeks Pendidikan	64,17	65,90
		S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6. Indeks Kesehatan	77,22	78,69
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<b>T3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas</b>	7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastrukturu	n.a	Baik

**KOTA BELOPA**





No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2023
		S3.1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas Wilayah	8. Tingkat Mobilitas	0,8638	0,8660
		S3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	9. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,97	0,98
4	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	<b>T4. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat</b>	10. Angka Kemiskinan (%)	12,78	11,97
		S4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat	11. PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	43,25	51,20
5	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	<b>T5. Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat</b>	12. Indeks Ketahanan Pangan	78	89
		S5. 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	13. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,98	5,78
6	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	<b>T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius</b>	14. Indeks kerukunan Umat Beragama	n.a	76,04

KOTA BELOPA



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2023
		S6.1. Menurunkan angka kriminalitas	15. Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	4,00	2,38
7	Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>T7. Meningkatkan Pembangunan Desa</b>	16. Jumlah Desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal	103	38
		S7.1. Meningkatkan kemandirian Desa	17. Persentase Desa mandiri	0,48	1,93
8	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	<b>T8. Meningkatkan Perekonomian daerah</b>	18. Pertumbuhan Ekonomi	6,26	4.49-5,99
		S8.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industry pengolahan	19. Kontribusi Lapangan Usaha Industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10,94	12,18,
9	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	<b>T9. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>	20. Indeks kepuasan Masyarakat atas penegakan Hukum dan Hak asasi manusia	n.a	82,63
		S9.1. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	21. Cakupan kasus hukum yang difasilitasi	100,00	100,00
10	Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	<b>T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>	22. Indeks kualitas lingkungan hidup	67,54	72,84



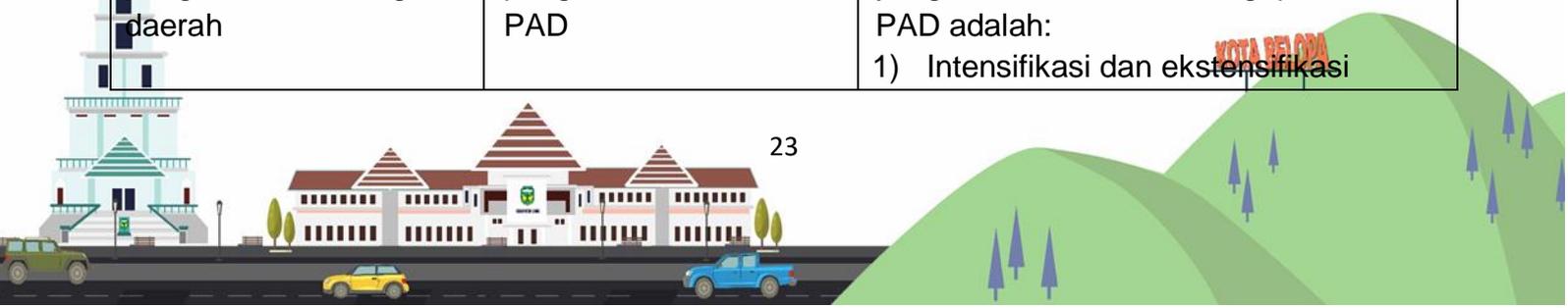
No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2023
		S10.1. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	23. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30,00	30,00



Tabel.2.3

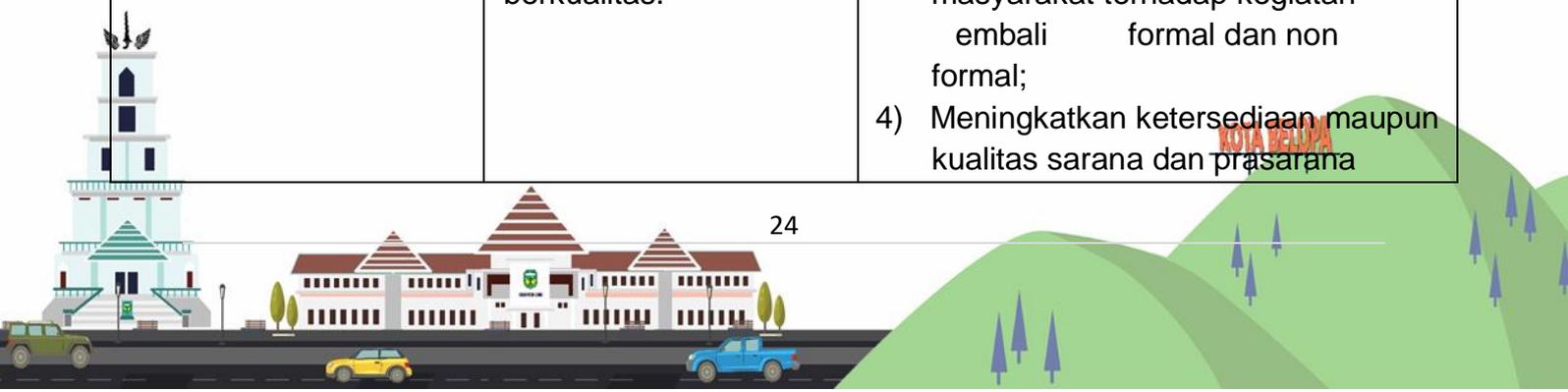
**SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021**

Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penataan organisasi dan peningkatan kualitas SDM aparatu	<p>Postur kelembagaan dan kemampuan SDM aparatur merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang ditempuh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi terhadap beban kerja pada setiap perangkat daerah;</li> <li>2) Proses bisnis yang sederhana, embali, adaptif dan membuka ruang peran serta embal dalam pemerintahan;</li> <li>3) Diklat embali, fungsional, teknis sesuai kebutuhan perangkat daerah;</li> <li>4) Penerapan merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai</li> </ol>
	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi	<p>Perencanaan yang baik dan selanjutnya konsisten dalam penganggaran serta pelaksanaan evaluasi secara regular merupakan kerangka kebijakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Arah kebijakan yang terkait dengan hal ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguatan embal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;</li> <li>2) Pengembangan birokrasi yang berintegritas dan terintegrasikan;</li> <li>3) Membangun organisasi yang akrab dengan pembelajaran.</li> </ol>
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pengelolaan sumber PAD	<p>PAD merupakan urat nadi pembangunan daerah. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan PAD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intensifikasi dan ekstensifikasi</li> </ol>



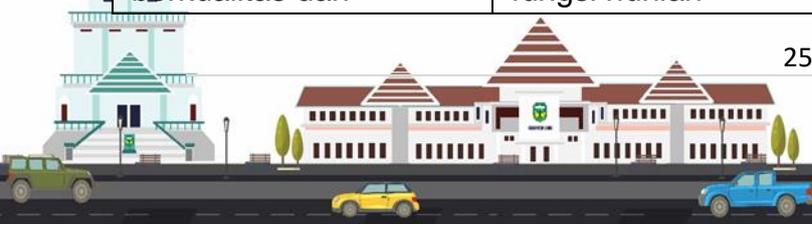


		<p>sumber sumber pendapatan daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD;</li><li>3) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan.</li></ol>
	<p>Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah</p>	<p>Anggaran yang terbatas harus dikelola untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu arah kebijakan yang ditempuh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan;</li><li>2) Penetapan dan pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu;</li><li>3) Tatakelola sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li><li>4) Akuntabel dan transparan.</li></ol>
<p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>Pengembangan pelayanan satu pintu</p>	<p>Mewujudkan terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang embali al e dan modern. Kebijakan tahun 2021 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan public;</li><li>2) Pengembangan embal informasi yang mudah dan adaptif;</li><li>3) Koordinasi yang baik dan terencana antarinstansi terkait</li></ol>
<p>Meningkatnya derajat embali masyarakat</p>	<p>Peningkatan akses layanan embali yang merata dan berkualitas.</p>	<p>Arah kebijakan untuk mengurangi dampak berbagai permasalahan dibidang kembali adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dukungan terhadap guru di daerah terpencil;</li><li>2) Pemerataan guru sesuai kebutuhan;</li><li>3) Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan embali formal dan non formal;</li><li>4) Meningkatkan ketersediaan maupun kualitas sarana dan prasarana</li></ol>



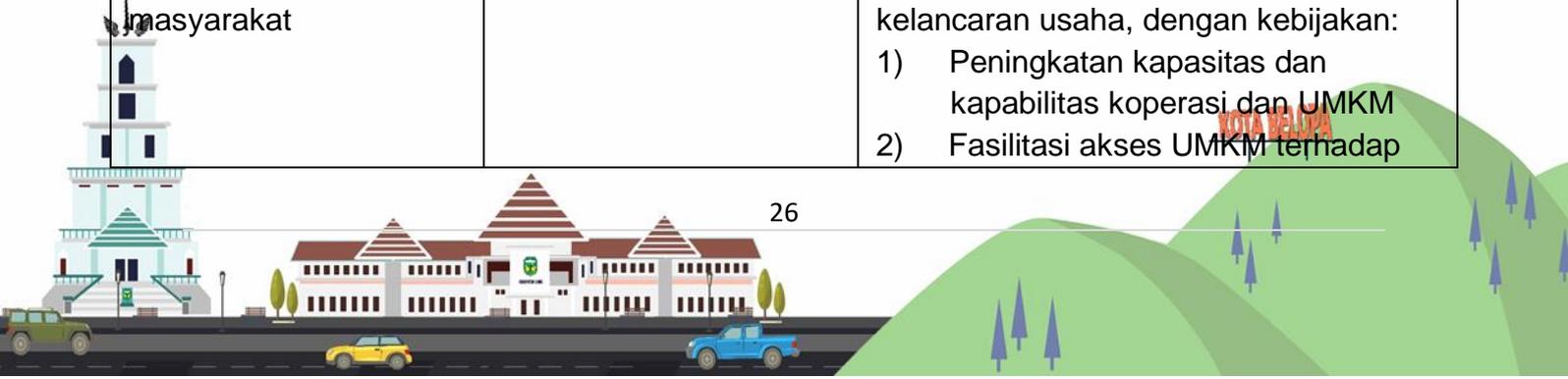


		embali ; 5) Bantuan kepada murid jenjang embali dasar.
Meningkatnya derajat embali masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa berbagai persoalan dalam pembangunan embali dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan, yaitu: 1) Kelompok sasaran program UKP dan UKM dipetakan dengan baik dan jelas; 2) Pemerataan layanan embali ; 3) Peningkatan kualitas layanan embali 4) Pencegahan dan Minimalisir jumlah pasien ODP, PDP, Positif Covid-19 5) Peningkatan layanan siaga Covid-19 di puskesmas dan rumah sakit, 6) Percepatan pencegahan stunting terintegrasi.
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Pertumbuhan perekonomian daerah membutuhkan infrastruktur yang mantap dan terkoneksi dengan sentra-sentra ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan. Kebijakan yang dilakukan adalah: 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan maupun jembatan yang diprioritaskan pada upaya menjangkau daerah terpencil; 2) Pengembangan aksesibilitas wilayah sebagai prioritas pemerataan Infrastruktur dengan peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara, serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan baik untuk kelancaran akses maupun keselamatan;
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung fungsi hunian	Menyediakan basic life access untuk penduduk perkotaan (termasuk menjadikan Belopa sebagai pusat kebudayaan Luwu) dan perdesaan





berkelanjutan		<p>dengan arah kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih dan sanitasi;</li> <li>2) Penataan lingkungan embali permukiman;</li> <li>3) Penyediaan maupun fasilitasi rumah layak huni;</li> <li>4) Penanganan embali permukiman kumuh,</li> <li>5) Meningkatkan sarana pelayanan embal dengan revitalisasi infrastruktur ruang embal pada pusat pelayanan embali dan pusat pelayanan lingkungan;</li> <li>6) Pengembangan Kota Hijau serta peningkatan kualitas lingkungan embali minapolitan dan agropolitan.</li> </ol>
Menurunnya jumlah pengangguran	<p>Peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja</p>	<p>Memberikan fasilitasi bagi tenaga kerja untuk lebih terampil dan embali al dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan keterampilan berbasis sesuai kebutuhan;</li> <li>2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan embali embali ;</li> <li>3) Pengembangan pariwisata daerah.</li> </ol>
	<p>Mendorong pertumbuhan lapangan kerja</p>	<p>Upaya untuk menyerap sebanyak mungkin embali kerja, dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendorong meningkatnya realisasi investasi;</li> <li>2) Pengembangan jasa konstruksi;</li> <li>3) Penggunaan material emba dalam pembangunan infrastruktur;</li> <li>4) Meningkatkan kreativitas dan inovasi</li> </ol>
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	<p>Pengembangan koperasi dan UMKM</p>	<p>Memberikan fasilitasi kepada koperasi dan UMKM untuk kemudahan dan kelancaran usaha, dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM</li> <li>2) Fasilitasi akses UMKM terhadap</li> </ol>





		<p>permodalan dan layanan perbankan;</p> <p>3) Peningkatan keterampilan sesuai potensi keunggulan.</p>
	<p>Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian</p>	<p>Fasilitasi kepada kelompok petani dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengembangan inovasi produk unggulan;</li><li>2) Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian/perkebunan;</li><li>3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani;</li><li>4) Bantuan sarana dan prasarana pertanian</li></ol>
<p>Meningkatnya perlindungan embal bagi seluruh masyarakat</p>	<p>Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan sosial</p>	<p>Upaya untuk penanggulangan PMKS dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Optimalisasi pendataan agar bantuan tepat sasaran;</li><li>2) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa</li><li>3) Pengawasan dan penyaluran bantuan Covid-19 bersumber dari dana desa maupun yang berasal dari Pusat dan Provinsi;</li><li>4) Penanganan PMKS serta monitoring dan evaluasi pada pusat-pusat pelayanan</li></ol>
<p>Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius</p>	<p>Fasilitasi kegiatan keagamaan, kebangsaan, dan kebudayaan</p>	<p>Upaya untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama, kerukunan hidup berbangsa, dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah, dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Aktif dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar agama, bangsa dan budaya, baik dalam daerah maupun luar daerah;</li><li>2) Pembinaan kesejahteraan keluarga;</li><li>3) Pelestarian seni dan cagar budaya.</li></ol>
	<p>Penataan dan sosialisasi produk hukum daerah</p>	<p>Upaya pembangunan dibidang hukum untuk ketertiban dan ketentraman, dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyusunan dan penetapan peraturan perundangan daerah;</li></ol>





		<ol style="list-style-type: none"><li>2) Sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah;</li><li>3) Peningkatan kapasitas aparatur Linmas.</li></ol>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Upaya preventif dan refresif dalam pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan, dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA maupun kelestarian alam;</li><li>2) Pengelolaan kebersihan;</li><li>3) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</li></ol>
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Upaya untuk meminimalisir korban akibat bencana alam maupun bencana non alam, dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana</li><li>2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana</li><li>3) Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid 19 dan Penetapan Tupoksi bertanggungjawab sesuai embal masing masing.</li><li>4) Respon Cepat Informasi Pasien terjangkit Covid-19 dalam mendapat pelayanan Medis</li></ol>

Dalam hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Luwu telah menindak lanjuti perbaikan Kualitas Dokumen SAKIP atau telah melakukan Transisi perubahan RPJMD 2019-2021 yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kembali Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu yang awalnya 20 Sasaran Kinerja telah di revisi menjadi 13 Sasaran Kinerja sehingga menggambarkan level Pemerintah Daerah.

Tabel 2.4

Perbaikan sasaran Pembangunan Daerah RPJMD 2019-2021





Sebelum		Sesudah		Ket.
No	20 Sasaran Kinerja	No	13 Sasaran Kinerja	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
4.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
6.	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	5.	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
7.	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	6.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
8.	Meningkatkan PSU kualitas lingkungan permukiman			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
9.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7.	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
10.	Mengembangkan destinasi wisata daerah			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
11.	Menurunnya jumlah pengangguran			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
12.	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	8.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
13.	Meningkatnya upaya penyebarluasan ajaran agama	9.	Menurunkan angka kriminalitas	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor





14.	Berkembangnya perekonomian desa	10.	Meningkatkan kemandirian desa	Perbaiki Sasaran Berdasarkan Sektor
15.	Meningkatnya realisasi investasi	11.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Perbaiki Sasaran Berdasarkan Sektor
16.	Meningkatkan produk hukum daerah	12.	Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan	Perbaiki Sasaran Berdasarkan Sektor
17.	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
18.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
19.	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
20.	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	13.	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Perbaiki Sasaran Berdasarkan Sektor

2. Merumuskan dan Menetapkan Kembali Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Luwu yang awalnya terdiri dari 24 Indikator Kinerja Utama telah di revisi menjadi 13 Indikator Kinerja Utama yang merupakan prioritas Kinerja Daerah yang akan diwujudkan Bupati Luwu bersama seluruh Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD)

Tabel 2.5





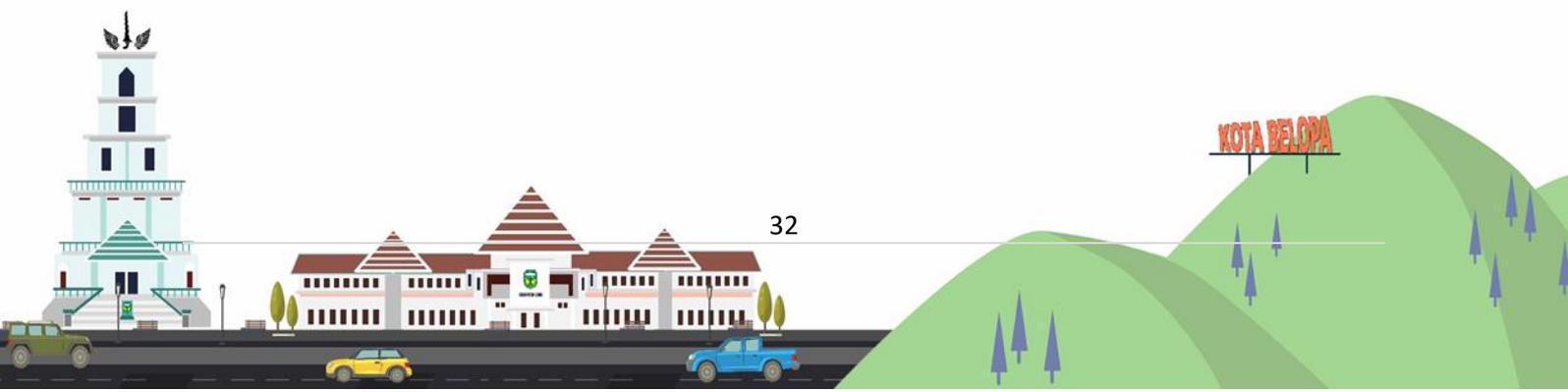
Review Terhadap Perubahan RPJMD 2019-2024

No	RPJMD LAMA			No	RPJMD BARU			KET
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET/R ENCANA CAPIAN 2021		SASARAN	INDIKATOR	TARGET/REN CANA CAPIAN 2023	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	72,02 (BB)	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan keuangan	WTP	2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK-RI	WTP	
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Baik					
4.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	64,42	3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	65,90	
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	76,64	4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	78,69	
6.	Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah	Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	26,26	5.	Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah	Tingkat mobilitas	0,8660	
7.	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase penduduk berakses air minum	86,19	6.	Meingkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,98	
		Rasio jaringan irigasi	65,00					
8.	Meingkatkan PSU kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	77,10					
9.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB perkapita (juta Rp.)	38,98	7.	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB perkapita ADHB (juta Rp.)	51,20	
		Indeks Gini	0,358					
10	Mengembangkan destinasi wisata daerah	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	2					
11.	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,25					





12.	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	7,30	8.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	5,78	
13.	Meningkatnya upaya penyebarluasan ajaran agama	Jumlah kader muballiq mudah (orang)	40	9.	Menurunkan angka kriminalitas	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	2,38	
		Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	25,00					
14.	Berkembangnya perekonomian desa	Jumlah bumdes berprestasi (maju dan mandiri)	0	10.	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	1,93	
15.	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	13	11.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	12,18	
		Persentase wirausaha muda	1,50					
16.	Meningkatkan produk hukum daerah	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	81,00	12.	Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100,00	
17.	Meningkatkan perlindungan social terhadap penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100,00					
18.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender	70,27					
19.	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	60,00					
20.	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)	30,00	13.	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)	30,00	





## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode berkenaan berjalan.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan yang berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 sebagai fokus utama kepala daerah dalam membangun daerahnya. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi. Guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu.

Demi mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan mengklasifikasikan kategori capaian, dimana interval dan kriteria realisasi kinerja merujuk pada skala



nilai peringkat kinerja pada Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Rentang capaian terhadap kategori capaian disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

**A. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2023**

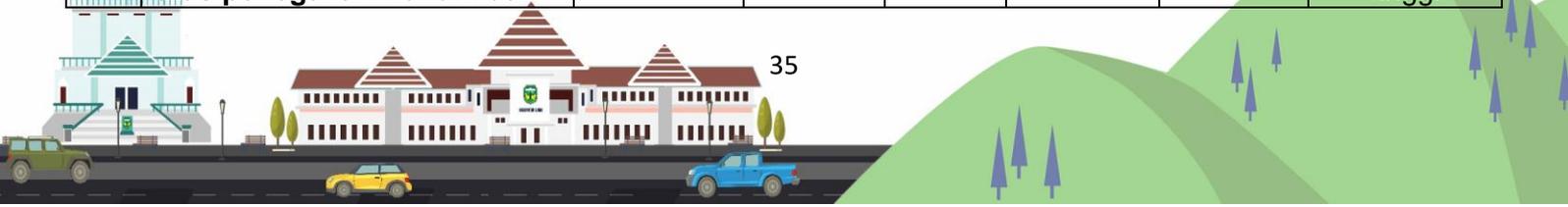
Indikator Kinerja Sasaran yang akan dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja adalah indikator masing-masing sasaran untuk setiap misi yang ada dalam dokumen RPJMD. Indikator sasaran tersebut berupa *Outcome* yang juga sekaligus merupakan indikator kinerja utama perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran-sasaran turunan dari misi yang tertuang didalam dokumen RPJMD 2019-2024 sebagaimana yang telah dirubah dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Secara ringkas capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun sebelumnya (2021) dan tahun yang diukur (2022) disajikan pada table berikut:



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Periode RPJMD 2019-2024

No.	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian Akhir Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Kat	91,49	64,22 (B)	45,01 (C)	70,08	Sedang
2	Kategori SAKIP Kabupaten	Kat	87,58	72,02 (BB)	61,81 (B)	85,82	Tinggi
3	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Kat	100	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi
4	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Skor	100,38	71,40	73,23	102,5	Sangat Tinggi
5	Indeks Pendidikan	Skor	92,30	65,90	93,88	142,4	Sangat Tinggi
6	Indeks Kesehatan	Skor	1,24	78,69	0,97	1,24	Sangat Rendah
7	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</b>	Kat	100	Baik	Baik	Baik	Sangat Tinggi
8	Tingkat Mobilitas	%	63,83	0,8660	68,30	7,6	Sangat Rendah
9	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	19,58	0,98	0,19	19,3	Sangat Rendah
10	<b>Angka Kemiskinan (%)</b>	%	0,97	11,97	12,71	106,18	Sangat Tinggi
11	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	Angka	112,45	51,20	52,49	102,5	Sangat tinggi
12	<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	%	95,21	89	86	96,6	Sangat tinggi
13	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	994,45	5,78	2,29	39,6	Sangat Rendah
14	<b>Indeks kerukunan Umat Beragama</b>	Angka	-	76,04	On Review		-
15	Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk	Angka	1,23	2,38	5,36	1,25	Sangat rendah
16	<b>Jumlah Desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal</b>	Angka	239,4	38	146	384,2	Sangat tinggi
17	Persentase Desa mandiri	%	0	1,93	0	0	Sangat rendah
18	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	97,43	4,49-5,99	5,64	94,1	Sangat Tinggi
19	Kontribusi Lapangan Usaha Industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Perusahaan	34,24	12,18	17	139,5	Sangat Tinggi
20	<b>Indeks kepuasan Masyarakat atas penegakan Hukum dan</b>	Angka	98,44	82,63	80,00	96,8	Sangat tinggi





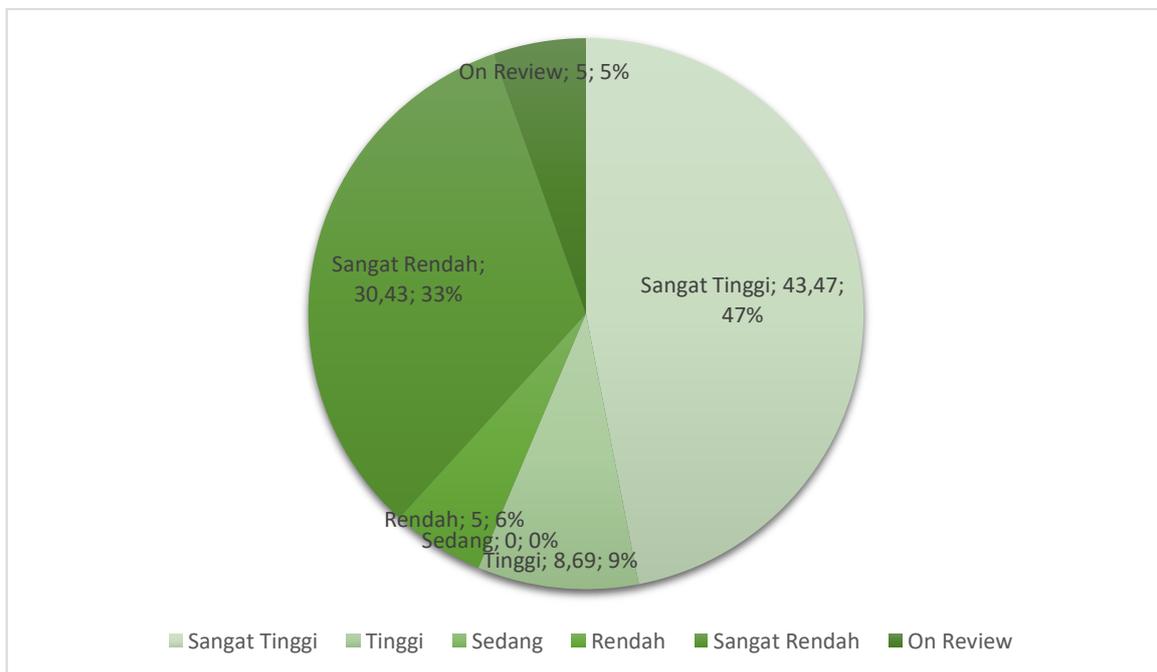
No.	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian Akhir Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Hak asasi manusia</b>						
21	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
22	<b>Indeks kualitas lingkungan hidup</b>	Angka	99,39	72,84	78,54	107,8	Sangat Tinggi
23	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Skor	24,74	30,00	187,91	24,74	Sangat rendah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 23 Indikator Kinerja Kabupaten Luwu yang terdiri dari 10 Indikator Tujuan dan 13 indikator sasaran, pada tahun 2022 capaiannya secara umum sudah sangat baik, dimana terdapat 13 indikator kategori capaian “Sangat Tinggi”, 1 indikator dengan kategori “Tinggi”, 0 indikator dengan kategori “Sedang”, 1 Indikator berkategori “Rendah”, 7 indikator dengan kategori “Sangat Rendah” dan ada 1 indikator yang belum dapat ditentukan capaian kinerjanya karena masih dalam proses “Review”. Berdasarkan kategori capaiannya tersebut Kategori Capaian Kinerja IKU Kabupaten Luwu Tahun 2023 seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1

### Diagram Capaian Kinerja IKU Tahun 2023



Indikator-indikator yang diukur merupakan turunan dari sasaran setiap misi kepala daerah yang termuat didalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Adapun Pencapaian masing-masing indikator tersebut kemudian diuraikan berdasarkan sasaran dari tiap-tiap misi sehingga sekaligus menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah selama periode jabatannya. Berikutnya capaian kinerja indikator utama Tahun 2023 periode RPJMD 2019-2024 dijabarkan masing masing berdasarkan misi dan sasaran masing masing.

#### 1. Capaian Kinerja Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Berwibawah, Amanah, Transparan dan Akuntabel

Dalam rangka mewujudkan misi pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Indikator utama yang terdiri dari 1 Indikator Tujuan dan 2 Indikator Sasaran. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.3  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang bai9k dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	64,22 (B)	45,01 (C)	70,08

### 1.1 Sasaran I: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

#### a. Capaian Kinerja

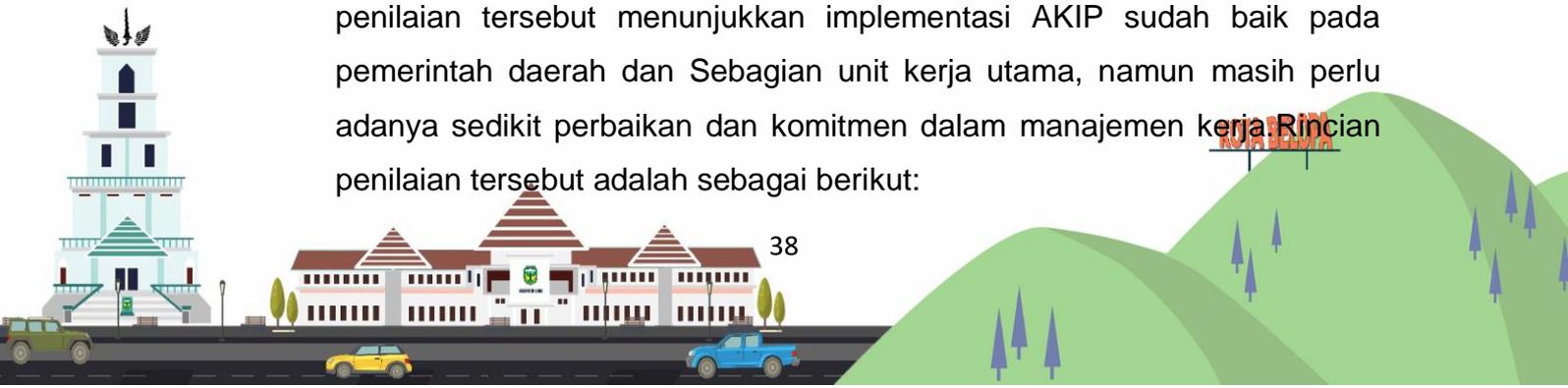
Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” pada misi “Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Berwibawah, Amanah, Transparan dan Akuntabel” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

#### Capaian Kinerja Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	72,02 (BB)	61,81 (B)	85,82
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>

Indikator kinerja SAKIP Kabupaten sebagaimana table diatas berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Pada Tahun 2023 memperoleh nilai 61,81 dengan predikat “B”, penilaian tersebut menunjukkan implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:



No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan	30	21,32
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,43
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,70
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,81
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023

Tabel 3.5

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran I tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya**

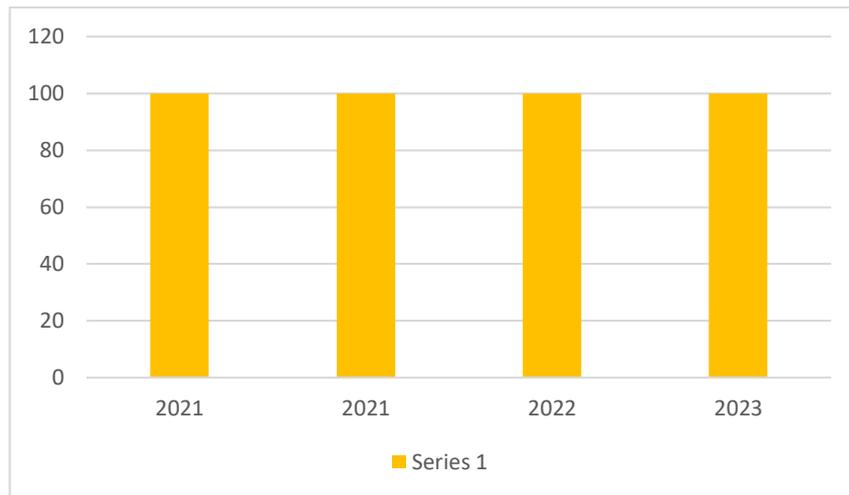
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai SAKIP	100	100	100	100	100

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan tiga tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini dapat dipertahankan secara konsisten sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Gambar 3.2

**Grafik capaian kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” beberapa tahun terakhir**





b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan informasi yang disampaikan, pemerintah Kabupaten Luwu telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan penyempurnaan kualitas perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Namun sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Menpan RB terhadap SAKIP Kabupaten Luwu Tahun 2023 berdasarkan Surat Menpan RB Nomor: B/561/AA.05/2023 perihal Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 tanggal 27 November 2023. Bahwa AKIP Pemerintah Kabupaten Luwu masih perlu untuk dilakukan perubahan terhadap sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu karena masih terdapat tujuan/sasaran strategis PD yang belum sepenuhnya menjawab isu strategis maupun mandate dari PD terkait, penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor atas pencapaian kinerja, Crosscutting kinerja belum sepenuhnya mengidentifikasi sharing outcome antar perangkat daerah untuk mempercepat tercapainya kinerja utama perangkat daerah. Telah terdapat penyempurnaan kualitas perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Luwu dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana





Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yang diikuti dengan perbaikan kualitas perencanaan Perangkat Daerah

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini adalah sebanyak 5 program yaitu: Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah dan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

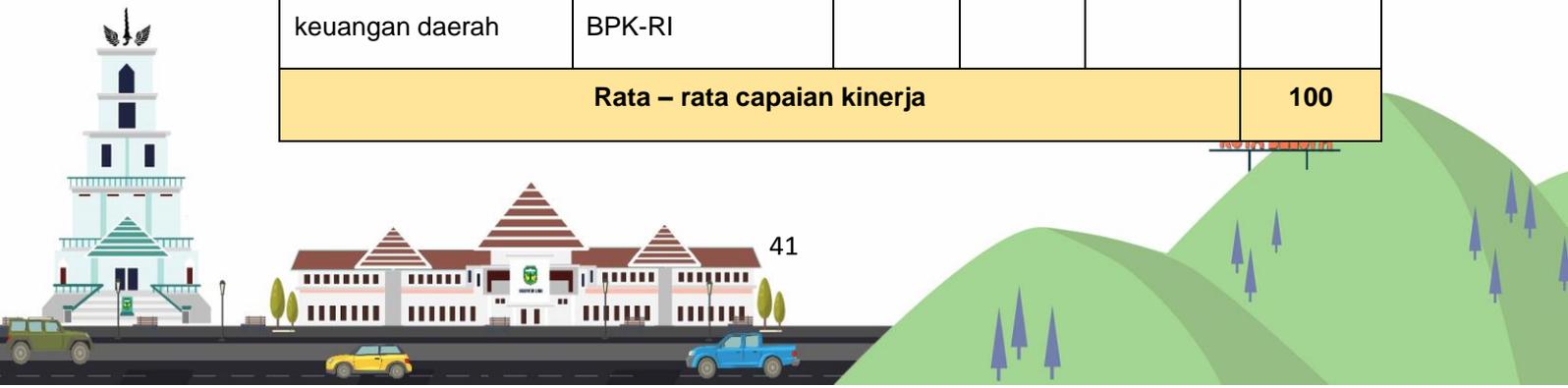
## 1.2 Sasaran II: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

- a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” pada misi “Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Berwibawah, Amanah, Transparan dan Akuntabel” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6  
**Capaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Kategori	WTP	WTP	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>



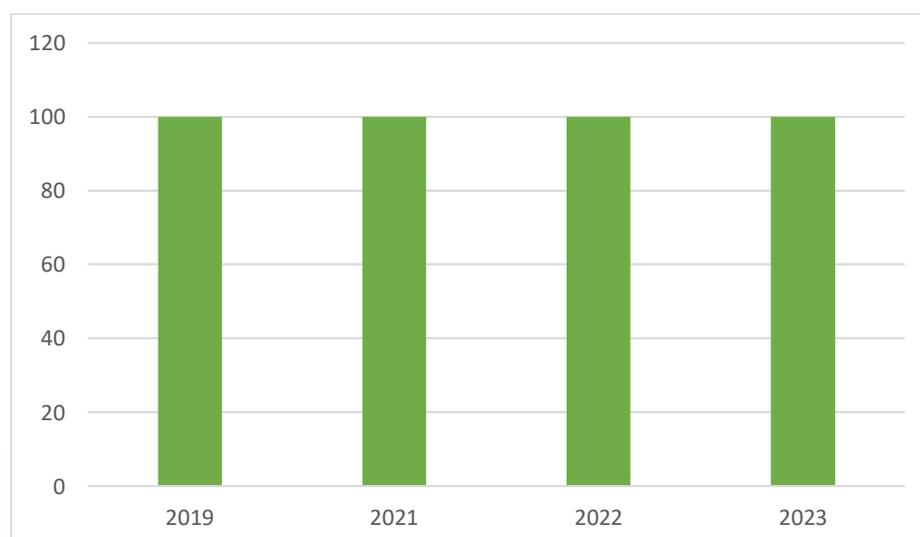
Dari indikator kinerja di atas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah kabupaten luwu telah mencapai target pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas sangat baik. Sebagaimana capaian dari realisasi targetnya adalah 100% dengan kategori “sangat Tinggi”.

Tabel 3.7  
Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran II tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	100	100	100	100	100

Meninjau capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ini mampu mempertahankan capaiannya selama beberapa tahun kebelakang, sebagaimana yang dapat disajikan pada grafik berikut:

Gambar 3.3  
Grafik capaian kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”





- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI;

Berbagai upaya telah dilakukan agar dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) didapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setiap pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai sehingga laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023. Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sejak 7 tahun terakhir secara berturut-turut mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana Acuan untuk pemberian opini WTP selain kepatuhan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian SAP dan Internal Control, juga disebabkan karena beberapa hal, yakni:

- 1 Adanya kepercayaan publik, transparansi, dan regulasi yang sehat dimana untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah;
- 2 Pemerintah mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan; dan
- 3 Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.



Untuk mempertahankan indikator tersebut diatas maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah Upaya Peningkatan Komitmen dari setiap unsur pelaksana bahwa upaya perbaikan pengelolaan keuangan tidak hanya dengan semangat tapi juga dengan dukungan dana yang besar, sumber daya manusia yang profesional dan yang paling penting adalah itikad untuk melaksanakan perbaikan secara kaffah.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas ini adalah sebanyak 3 program, yaitu: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah;

## 2. Capaian Kinerja Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Indikator yang terdiri dari 1 Indikator tujuan dan 2 Indikator Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	71,09	73,23	102,5



## 2.1 Sasaran I : Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” dapat dijabarkan sebagaimana tabel:

Tabel 3.9

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	65,90	93,88	142,4
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					

Dari indikator kinerja di atas yaitu meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat, dengan capaian sebesar 93,88 dan masuk dalam predikat Sangat Tinggi

Tabel 3.10

### Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya

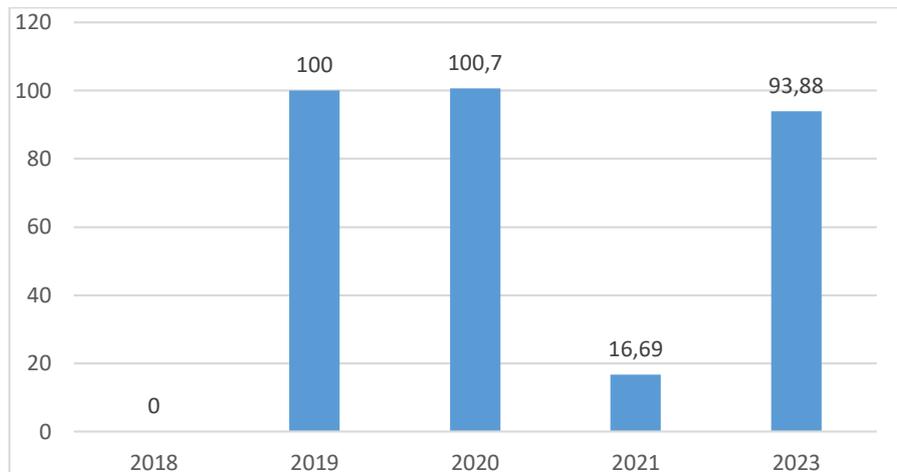
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pendidikan	100	100,7	16,69	92,30	93,88

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat pada tahun 2023 mengalami kenaikan, untuk lebih mudah memahami maka disajikan gambar berikut ini:



Gambar 3.4

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sebagaimana data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada laman <https://sulsel.bps.go.id/indicator/26/299/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-.html> bahwa HLS Kabupaten Luwu pada Tahun 2022 adalah 13,35 sementara RLS Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah 8,48. Sehingga dari angka tersebut diperoleh realisasi Indek Pendidikan Kabupaten Luwu sebesar 10,85, yang mana dari angka tersebut dibandingkan dengan target 65,44 sehingga realisasi dari capaian kinerjanya adalah 92,30%.

Apabila mencermati hal tersebut, dapat dipahami bahwa target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah terlalu tinggi dan tanpa melalui perhitungan yang matang dengan artian tidak menggunakan rumus sebagaimana yang telah ditetapkan. Sehingga menjadi solusi kedepannya adalah melakukan perubahan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyiapkan formula/rumus pada setiap sasaran capaian kinerja.



- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat ini adalah sebanyak 3 program, yaitu: Program Pengembangan Pendidikan Non-Formal, Program Pembinaan Sekolah Dasar, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Pengelolaan Budaya Daerah.

## 2.2 Sasaran II: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

### a. Capaian Kinerja

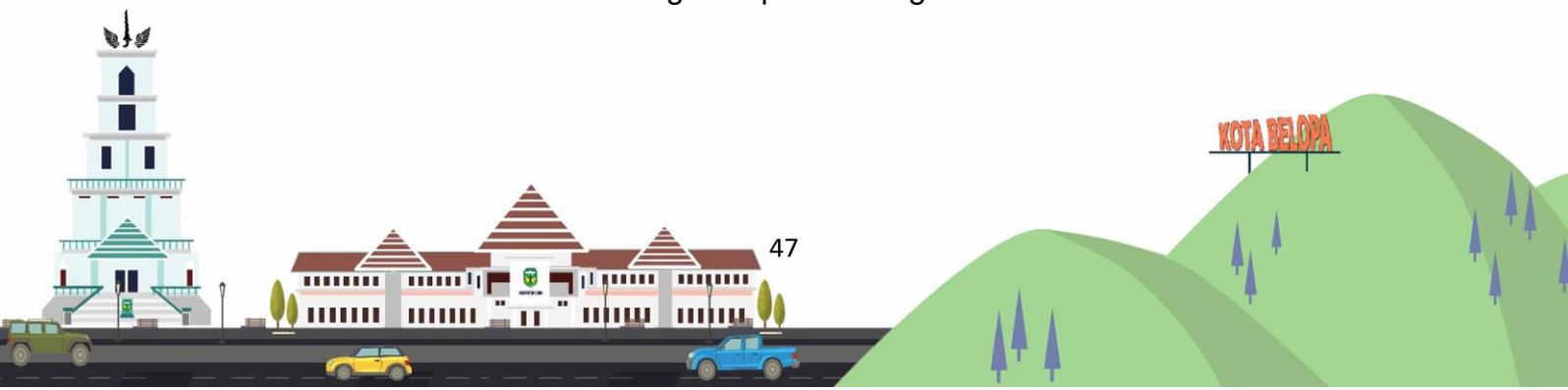
Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” Dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.11

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	78,30	0,97	1,24
Rata – rata capaian kinerja					1,24

Dari indikator kinerja pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah target indikator kinerja pada Indeks Pendidikan belum tercapai. Dilihat dari capaian kerjanya hanya mampu memperoleh realisasi sebesar 1,24% dari target yang telah ditetapkan hal ini masuk dalam kategori capaian “sangat Rendah”.



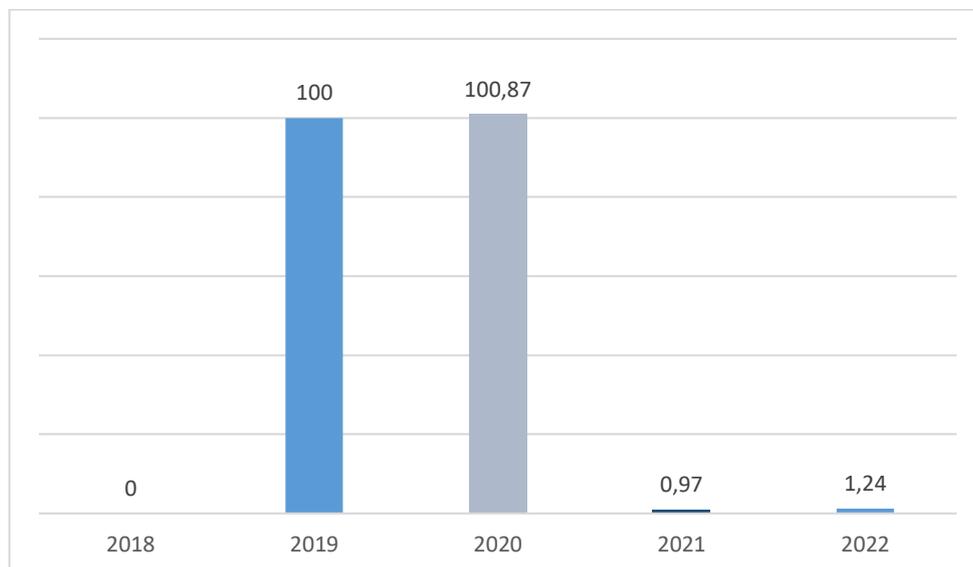
Tabel 3.12

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran II tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kesehatan	100	100,87	0,97	1,24	1,24

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Sasaran kinerja untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat mengalami kenaikan skor, sebagaimana capaian kinerja dari beberapa tahun terakhir memperoleh capaian hingga melebihi target sementara 2023 hanya mendapat 1,24% dari targetnya, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.5

**Grafik capaian kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yaitu: Indeks Kesehatan





Indeks Kesehatan diperoleh dari Angka Harapan Hidup (AHH). Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu dalam Buku Luwu Dalam Angka 2022 bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu mencapai: 70,75. Besar kecilnya Angka Harapan Hidup (AHH) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kualitas lingkungan
2. Kualitas prilaku/pola hidup
3. Kualitas pelayanan kesehatan

Bila mencermati dari aspek pertumbuhan AHH di Kabupaten Luwu dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 hanya 70,44. Dan ini menandakan bahwa Indeks Kesehatan di Kabupaten Luwu sebenarnya terus meningkat. Hanya saja apabila dicermati dari aspek, Capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan. Indeks Kesehatan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh sebab itu, sebagai solusi dan strategi dalam meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan perubahan penetapan target pada indikator kinerja utama.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ini adalah sebanyak 2 program dan 28 Kegiatan yaitu: Program Upaya Kesehatan 14 kegiatan dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14 kegiatan;

### **3. Capaian Kinerja Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan**

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 1 Indikator Tujuan dan 2 Indikator sasaran. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut



Tabel 3.13  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur	Kategori	Baik	Baik	100

### 3.1 Sasaran I: Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah

#### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.14

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah	Tingkat Mobilitas	%	0,8660	68,30	7,6
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah mengalami penurunan, sebagaimana dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai 68,30 dengan kategori “Rendah”.



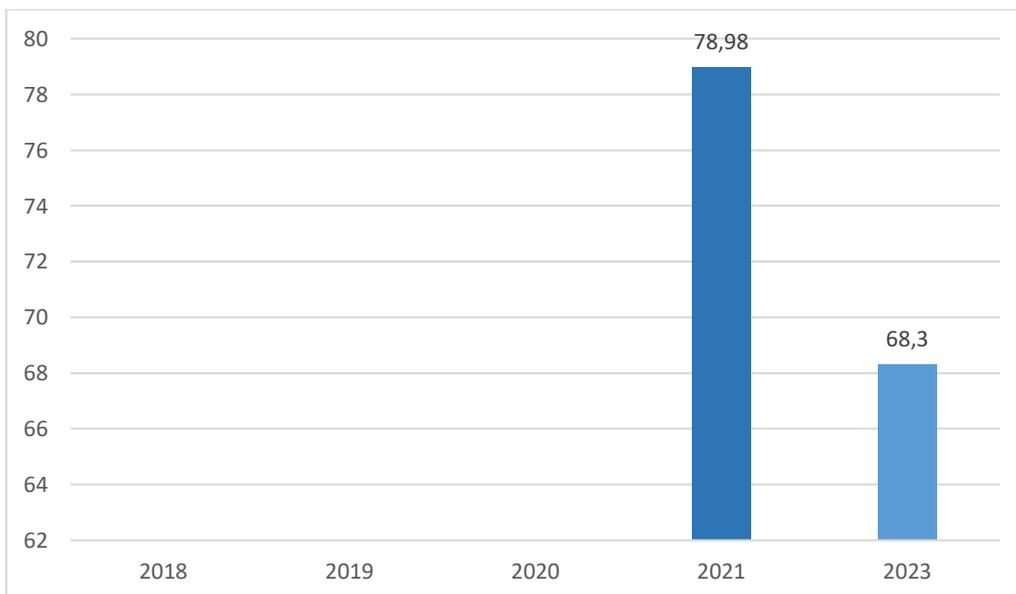
Tabel 3.15

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Mobilitas	-	-	78,98	63,8268	68,30

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Tingkat Mobilitas telah mencapai kategori capaian kinerja Rendah mengalami penurunan dengan presentase capaian 68,30. Adapaun grafiknya sebagai berikut:

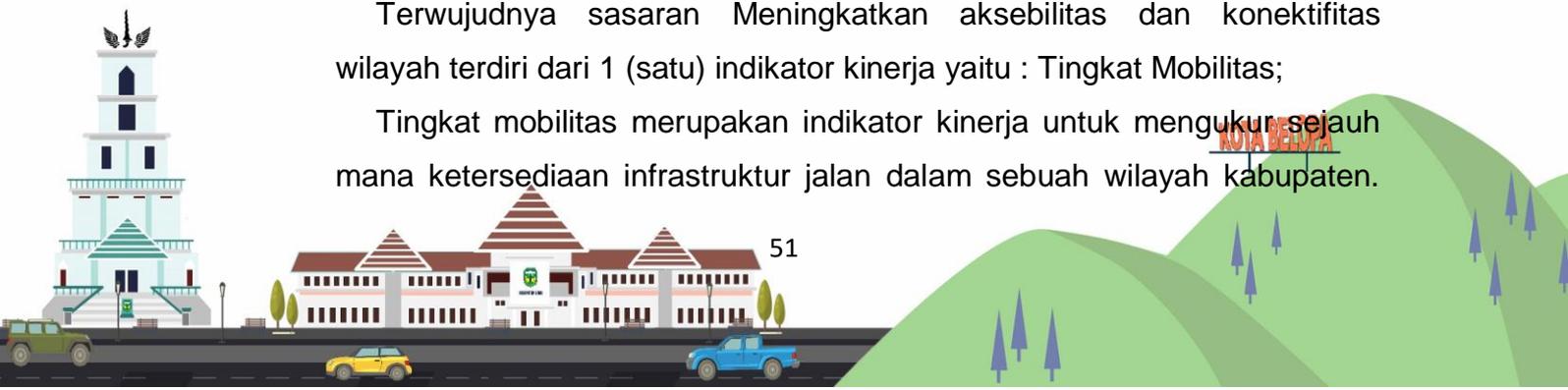
Gambar 3.6

**Grafik capaian kinerja Sasaran  
"Tingkat Mobilitas"**

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Tingkat Mobilitas;

Tingkat mobilitas merupakan indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana ketersediaan infrastruktur jalan dalam sebuah wilayah kabupaten.



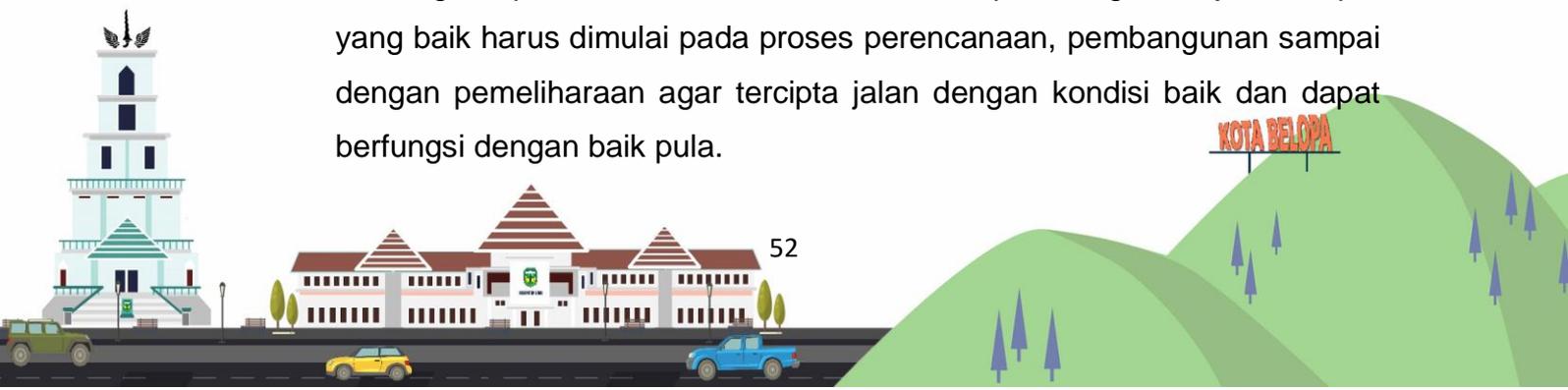


Sebagaimana data dari Dinas PUTR Kabupaten Luwu bahwa di tahun 2023 ketersediaan infrastruktur dalam hal ini Panjang Jalan Kabupaten Luwu adalah 2.049,45 km dan luas wilayah Kabupaten Luwu seluas 3.000,25 Km<sup>2</sup>. Sehingga Tingkat mobilitas kabupaten Luwu adalah 0,55236.

Indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sempat mengalami penurunan di tahun 2021 karena mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Adanya penambahan jalan baru/pembentukan yang tidak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan, menurut aturan jumlah Panjang jalan harus sesuai Panjang jalan yang ada di SK Bupati Nomor 379/X/2015 tentang penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu.
2. Mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik yang disebabkan bahan yang dipergunakan tidak baik atau diluar ketentuan teknis. Hal ini yang sering kali menjadi faktor pendukung terjadinya kerusakan lebih cepat.
3. Rendahnya kualitas pengawasan pada pelaksanaan proyek tersebut yang berakibat pada hasil/kualitas pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Air yang mengalir di badan jalan/tidak ada saluran, karena menurut pengalaman, jalan yang sistem pelimpasan buruk akan semakin cepat rusak jalan tersebut. Bisa juga karena air yang menggenang di jalan.
5. Perencanaan yang kurang tepat, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.

Sehingga untuk meningkatkan indikator tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dalam menangani permasalahan tersebut, bahwa pembangunan jalan aspal yang baik harus dimulai pada proses perencanaan, pembangunan sampai dengan pemeliharaan agar tercipta jalan dengan kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula.



- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK) dan Kegiatan Peningkatan Jalan (DID).

### 3.2 Sasaran II: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman

- a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.16

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	0,97	0,19	19,3
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					-

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman belum berjalan dengan baik. Sebagaimana capaian dari kinerjanya mencapai hanya mencapai 19,3 atau dengan kategori “Sangat Rendah”.



Tabel 3.17

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	-	-	19,58	19,58	19,3

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat Indikator kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang baru termuat di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten pada Tahun 2023.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;

Indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dihitung berdasarkan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu, diperoleh data jumlah lingkungan pemukiman yang telah didukung oleh PSU sebesar 45 Lingkungan. Sementara total lingkungan Pemukiman di Kabupaten Luwu berjumlah 227 yang terdiri dari 207 Desa dan 20 Kelurahan.

Adapun capaian kinerja yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan disebabkan karena ada beberapa aspek-aspek pembangunan sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih yang belum memiliki perencanaan terpadu dan belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sehingga untuk Untuk lebih meningkatkan capaian indikator tersebut diatas dan demi



pencapaian kinerja yang lebih baik, kiranya perlu penyusunan perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

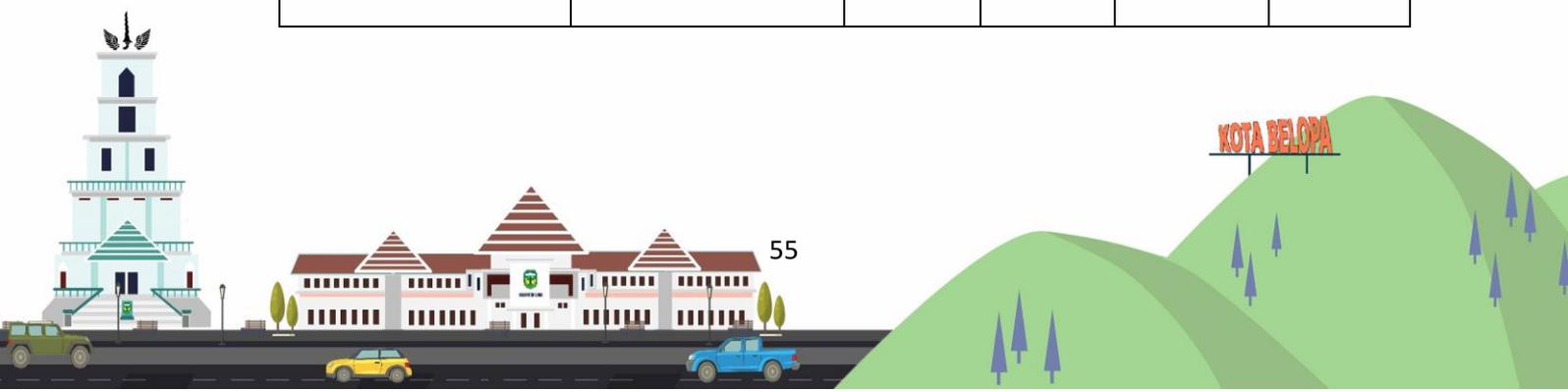
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar adalah sebanyak 3 program yaitu: (1) Program Pembangunan dan Penataan PSU; (2) Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman; (3) Program Pengembangan Perumahan

#### 4. Capaian Kinerja Misi 4: Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 1 Indikator tujuan dan 1 Indikator Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	11,97	12,71	106,18



#### 4.1 Sasaran I: Meningkatkan pendapatan masyarakat

##### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat” pada misi “Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.19

#### Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”

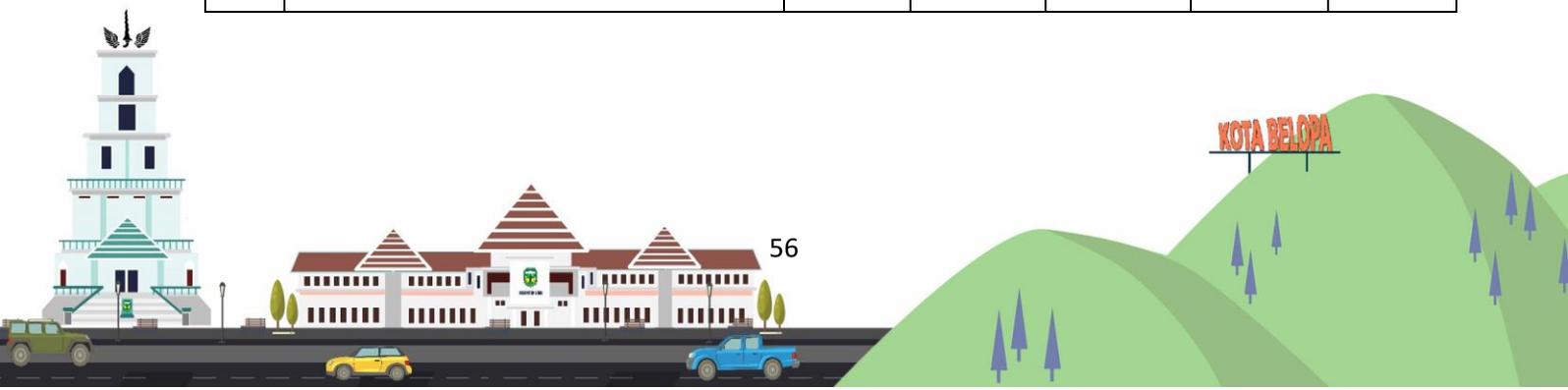
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	Angka	51,20	52,49	102,5
Rata – rata capaian kinerja					

Mengamati tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator PDRB Perkapita mengalami kenaikan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 102,5 dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.20

#### Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya

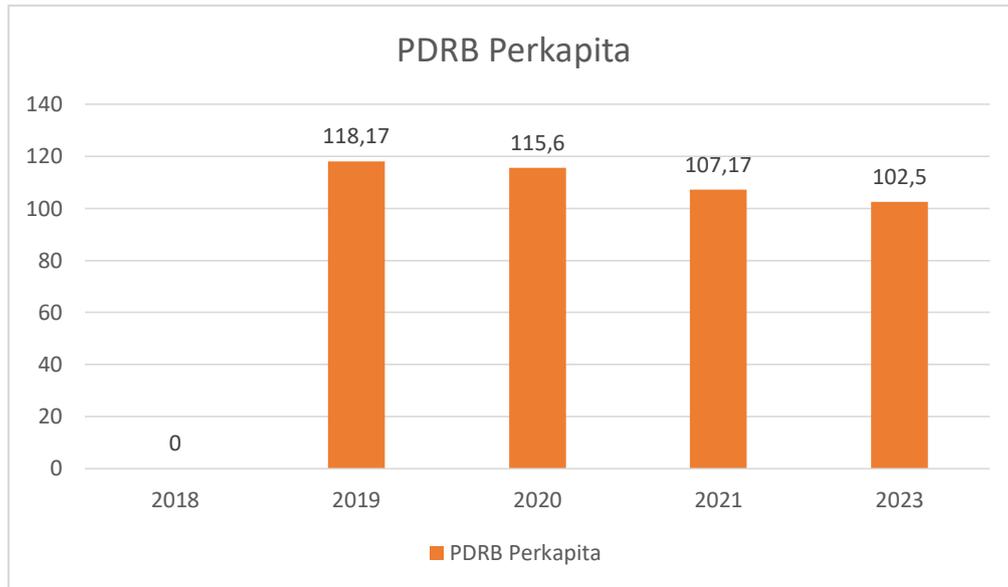
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2023
1.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	-	118,17	115,6	107,17	102,5



Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat mengalami penurunan sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3.7

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu: 1) PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)

Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB dapat disajikan dalam bentuk perkapita untuk mengetahui gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Apabila melihat data pada table diatas data PDRB perkapita kabupaten luwu cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini tentunya di akibatkan karena adanya Pandemi Covid-19. Beberapa pengaruh pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu:

1. Dilakukannya PSBB secara Nasional. Sehingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan pembatasan berpergian.



2. Pembayaran Kredit ke Industri keuangan menjadi macet.
  3. Kemampuan berbelanja masyarakat menjadi lemah karena kurangnya pemasukan.
- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

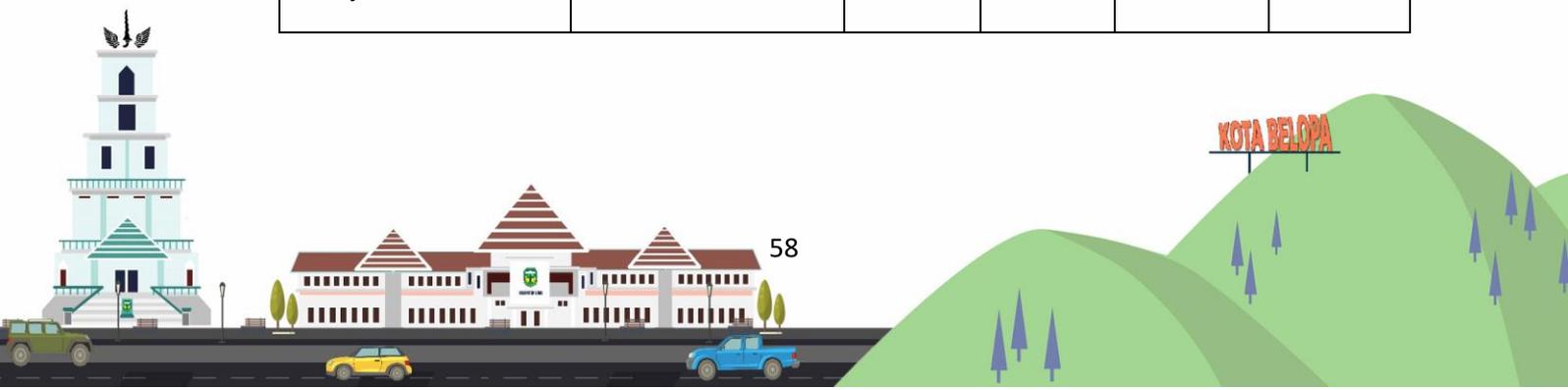
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ini adalah sebanyak 4 program dan 6 kegiatan, yaitu: Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro 2 kegiatan dan Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 kegiatan;

## 5. Capaian Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Tujuan dan 1 Indikator Kinerja Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi dan Kemandirian - Pangan Sebagai Penopang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	%	89	86	96,6



## 5.1 Sasaran I: Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah” pada misi “Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.22

### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	5,78	2,29	39,6
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami berjalan dengan baik. Karena presentase capaian dari kinerjanya mengalami kenaikan melebihi target yang telah ditetapkan 39,6% dan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator sasaran ini masuk kategori capaian kinerja “Sangat Rendah”;



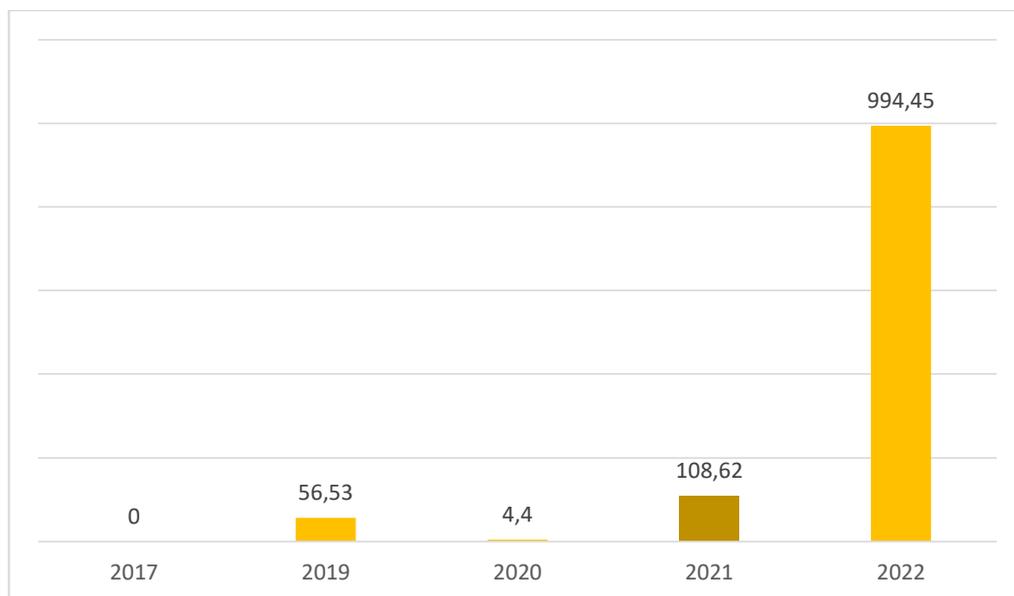
Tabel 3.23

**Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	56,53	4,4	108,62	994,45	39,6

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3.8

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%);





Sebagaimana data yang tersaji dapat dipahami bahwa laju pertumbuhan PDRB di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu 994,45% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sector pertanian adalah sector yang tidak memiliki pengaruh langsung dari dampak Pandemi Covid 19. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sector yang memiliki pertumbuhan yang juga signifikan. Dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 sebesar 8.201.858,05 (dalam juta rupiah) sementara 2020 sebesar 8.353.521,69 (dalam juta rupiah) selisi 151.663,64 (dalam juta rupiah). Sementara 2021 PDRB ADHB sebesar 9.492.949,91 (dalam juta rupiah) selisih dari tahun 2020 adalah 1.139.428,22 (dalam juta rupiah). Dari data tersebut tergambar bahwa PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Strategi kedepannya agar PDRB berjalan dengan baik akan Kembali mengeluarkan program pemerintah yang menstimulasi lapangan usaha sector pertanian.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

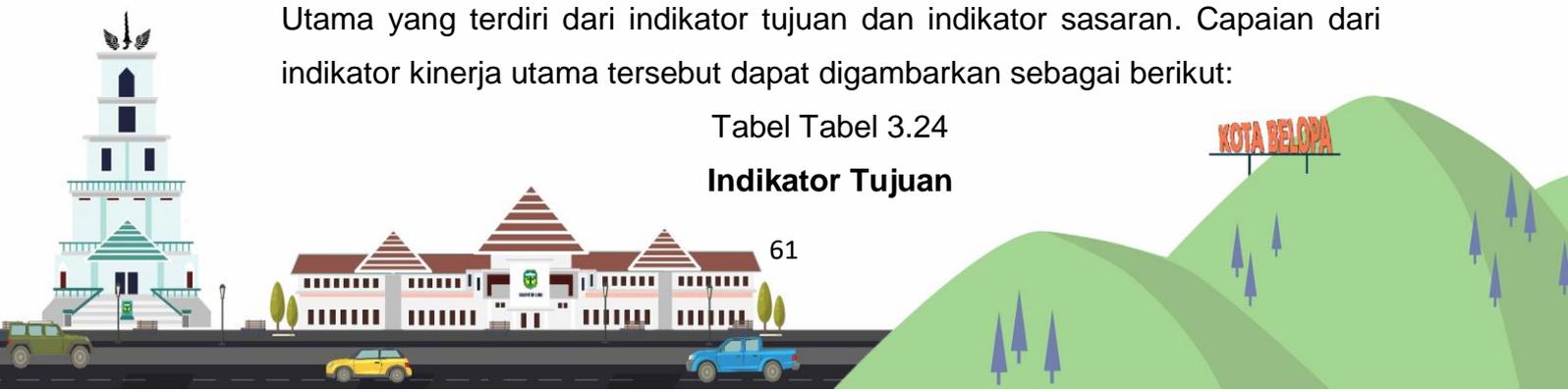
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini adalah sebanyak 2 program dan 7 kegiatan, yaitu: program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan 7 kegiatan.

## 6. Capaian Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Tabel 3.24

### Indikator Tujuan



Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang tertib, aman dan religius	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,03	On Reviw	-

## 6.1 Sasaran: Menurunkan angka Kriminalitas

### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Menurunkan angka Kriminalitas” pada misi “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.24  
**Capaian Kinerja Sasaran  
Menurunkan angka Kriminalitas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunkan angka Kriminalitas	Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk	Angka	2,38	5,36	1,25
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>1,25</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator Menurunkan angka Kriminalitas sebagaimana yang tergambar pada table diatas tidak berjalan dengan baik karena capaian realisasinya tidak tercapai, hanya 1,25 yang tercapai dengan kategori “Sangat rendah”.



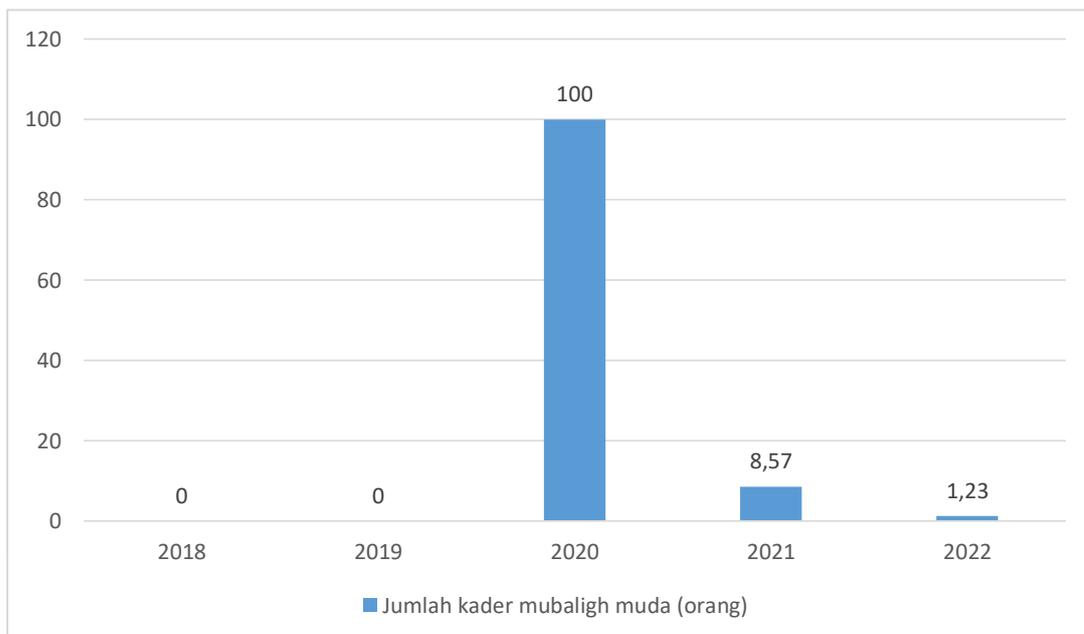
Tabel 3.3

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk	-		100	8,57	1,23	1,25

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, untuk Indikator Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk mengalami penurunan yang sangat drastic, hal ini dikarenakan data yang digunakan sebagai capaian kinerja pada tahun sebelumnya tidak jelas sumbernya sehingga bisa diasumsikan bahwa data tahun sbelumnya adalah data yang tidak sesuai. Sementara di tahun 2022 data yang diperoleh adalah data dari Pihak kepolisian Luwu terhadap kasus kriminal yang dilaporkan dan telah ditangani. Adapun perbandingan dari tahun sebelumnya:

Gambar 3.9

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Menurunkan angka Kriminalitas terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk.

Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Kepolisian Luwu bahwa data jumlah kasus kriminal yang telah ditangani adalah sebanyak 105 kasus. Dimana kasus tersebut terdiri dari kasus Penganiayaan, Pencurian, Pengeroyokan. Sehingga melihat kondisi capaian kinerja Kabupaten Luwu belum mampu menekan kriminalitas sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor:

1. Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi faktor yang paling mendasar terjadinya kasus pencurian. Apalagi Tahun 2020 hingga tahun 2021 adalah tahun yang bisa dikatakan sangat sulit bagi para pencari uang, mengingat kasus Covid-19 yang meningkat sehingga menyebabkan perputaran uang lambat dan banyak orang merasakan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor Perkembangan Teknologi (Media sosial)

Terjadinya kasus asusila disebabkan karena semakin terbukanya informasi. Dimana kemudian mengakses berbagai informasi yang dapat mempengaruhi perilaku manusia sudah mudah dibuka, seperti melihat gambar-gambar pornografi dan video porno. Hal ini melatarbelakangi maraknya terjadi kasus Sekseualitas. Dilain sisi karena perkembangan media sosial yang semakin maju, melatarbelakangi kasus penganiayaan karena dimanfaatkan tidak baik oleh penggunanya, seperti digunakan untuk menyebarkan kebencian, saling mengejek dan memberikan komentar yang tidak baik.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya preventif dengan memarakan sosialisasi untuk penggunaan media sosial dengan baik dan juga pemerintah daerah agar intens mengeluarkan program-program yang mampu memberi insentif pada pertumbuhan ekonomi.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Menurunkan angka Kriminalitas ini adalah sebanyak 2 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Program Peningkatan Kapasitas Legislasi.

## 7. Capaian Misi 7: Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.25  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pembangunan Desa	Jumlah Desa dengan Predikat Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Angka	38	146	384,2

### 7.1 Sasaran: Meningkatkan Kemandirian Desa

#### a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa” pada misi “Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.26

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembangunan Desa**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kemandirian Desa	Presentase Desa Mandiri	%	0,97	0	0
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>0</b>

Jika melihat capaian indikator yang mendukung sasaran berkembangnya perekonomian desa di atas, kita memahami bahwa tidak ada capaian dari kinerja atau dengan kata lain 0% kategori “Sangat Rendah”.

Tabel 3.27

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Presentase Desa Mandiri		0	0	0	0

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Berkembangnya Perekonomian Desa belum berjalan seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.10

**Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa”**



terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.28

**Indikator Tujuan**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pembangunan Desa	Jumlah Desa dengan Predikat Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Angka	38	146	384,2

**Sasaran I: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan**

## a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan” pada misi “Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.29

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Perusahaan	12,18	17	139,8
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					<b>139,8</b>

Dari table di atas dapat dipahami bahwa capaian kinerja dari Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan adalah sebesar 139,8 dengan kategori “Sangat Tinggi”.



Tabel 3.30

**Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2012	2021	2022	2023
1	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	-	-	-	34,65	34,24

Indikator kinerja Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) adalah Indikator yang baru dimasukkan dalam dokumen perubahan RPJMD dan IKU daerah sehingga belum bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : (1) Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%);

Sektor industri pengelolaan merupakan salah satu sector (jenis lapangan usaha) yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Apabila melihat data BPS pada laman Web BPS kabupaten Luwu <https://luwukab.bps.go.id/indicator/52/188/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html> bahwa Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan Usaha Kabupaten Luwu dari sector Industri pengelolaan sejak tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan. Apabila dicermati, tahun 2019 adalah tahun dimana Pandemi Covid-19 mulai menjangkit masyarakat Indonesia tidak terlepas masyarakat Kabupaten Luwu juga. Industri Pengelolaan adalah sector yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja. Pada saat Pandemi hamper semua perusahaan industri di Kabupaten Luwu juga turut mengurangi tenaganya. Hal ini memberi dampak juga terhadap





kontribusi lapangan usaha pengelolaan industri terhadap PDRB Kabupaten Luwu.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya realisasi investasi ini adalah sebanyak 1 program yaitu: Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non-Perizinan.

## 9. Capaian Misi 9: Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Indikator tujuan dan Indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

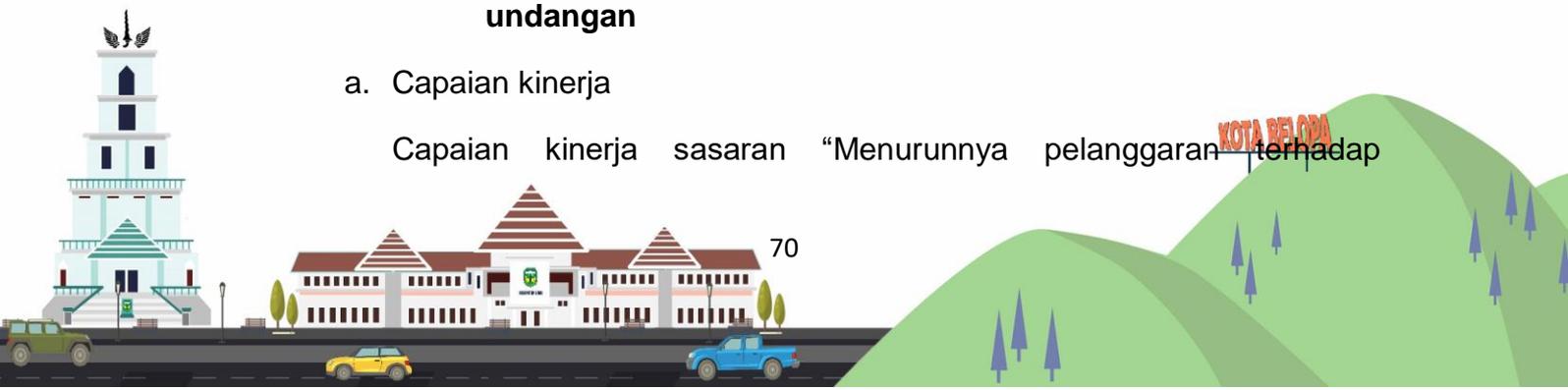
Tabel 3.31  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Penegakan Supermasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan masyarakaty atas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Angka	81,27	80,00	98,44%

### 9.1 Sasaran: Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

- a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran "Menurunnya pelanggaran terhadap



peraturan perundang-undangan” pada misi “Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.32

**Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)	%	100	100	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa tercapai dengan baik. Capaian kinerja 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

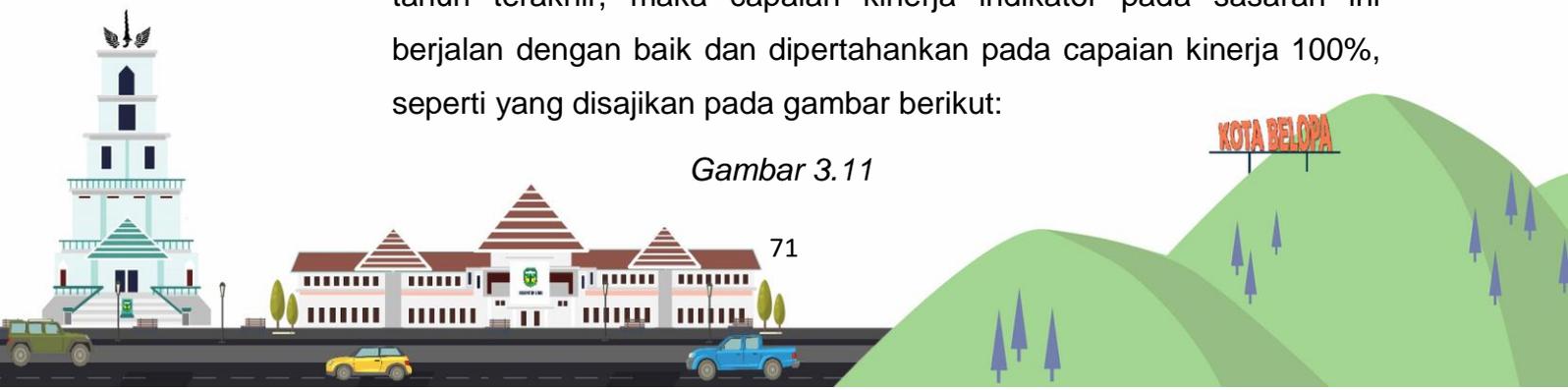
Tabel 3.33

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya**

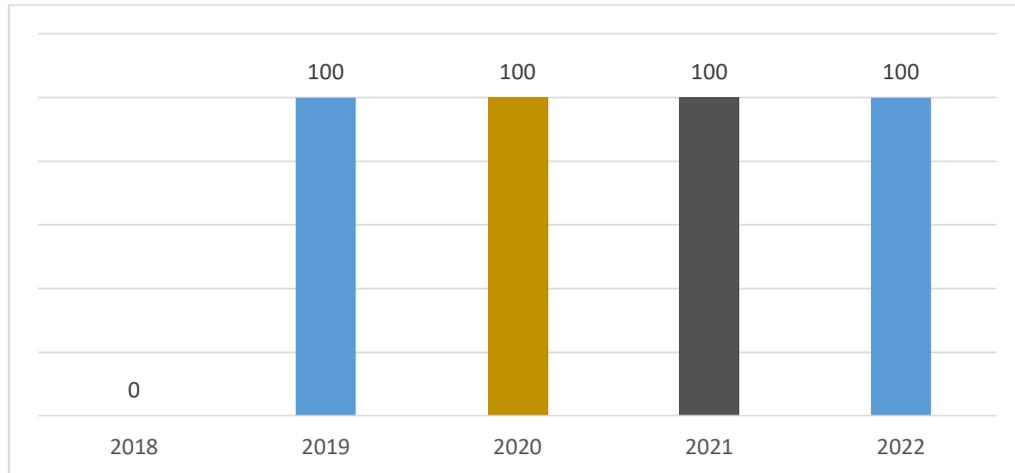
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)	100	100	100	100	100

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran ini berjalan dengan baik dan dipertahankan pada capaian kinerja 100%, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.11



## Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan Produk Hukum Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)

Indikator Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan. Sebagaimana data yang diperoleh dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah bahwa terdapat 2 (dua) kasus hukum yang terjadi selama tahun 2021 dan telah difasilitasi dengan baik, yaitu Kasus Perdata SDN Pongsamelung yang terdapat di Kecamatan Lamasi dan kasus Tata Usaha Negara. Semua telah difasilitasi dengan baik dan terselesaikan. Untuk mempertahankan hal ini pemerintah Kabupaten Luwu terus mendorong pelayanan dalam bidang hukum melalui program-program kegiatan yang menunjang pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah ini adalah sebanyak 3 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Kepastian Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



dan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyarakat;

## 10. Capaian Misi 10: Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.34  
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indek kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,84	78,54	99,39

### 10.1 Sasaran: Meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi bencana

#### a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Men Meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi bencana” pada misi “Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana” dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3.35

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indek Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Skor	30,00	187,71	24,74
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa capaian kinerja indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH telah mencapai kinerja 90% dengan kategori “Tinggi”

Tabel 3.36

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan beberapa tahun sebelumnya**

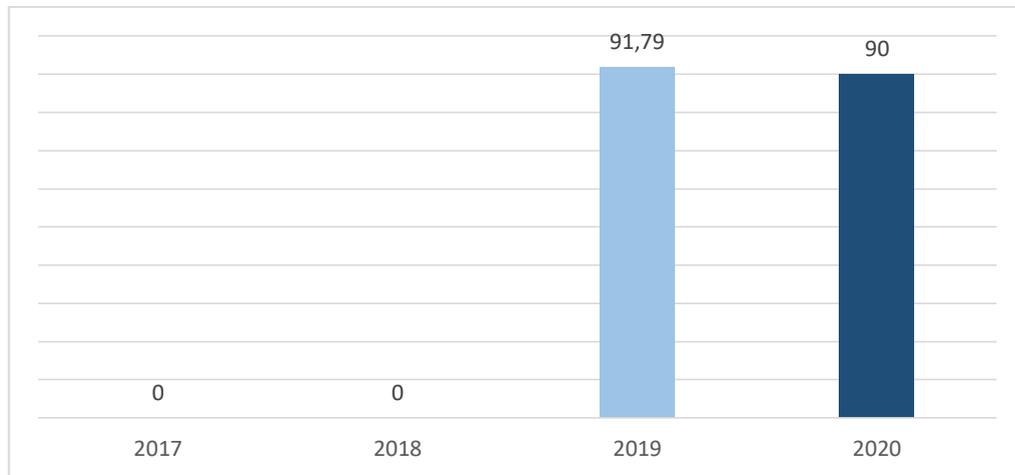
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	100	100	100	100	100

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan menggambarkan pencapaian yang sangat baik, seperti yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.12

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**



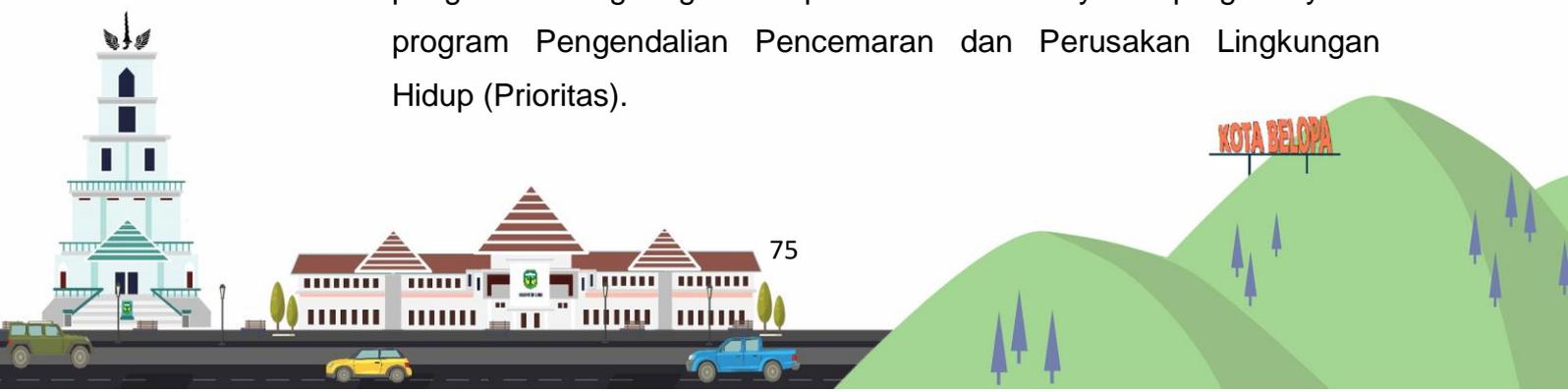
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%);

Indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%) dari data yang tersaji pada gambar 3.20 mengalami penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja indikator tersebut, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kompetensi sumber daya manusia, anggaran dan sarana-prasarana.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah sebanyak 1 program yaitu: program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas).





## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan untuk mencapai terciptanya kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud tersebut, diperlukan dukungan dana yang memadai, yang dikelola oleh sumber daya aparatur yang profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi dengan pengimplementasian sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi logis semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu senantiasa mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengelolaan pemungutan PAD masuk kedalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri dan tidak sebagaimana Dana Perimbangan yang lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, olehnya itu diharapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, serta proses yang sederhana dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatutan, potensi dan karakteristik daerah, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.37

**Realisasi Pendapat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2022	Realisasi 2023
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 163.816.263.663,56</b>	<b>Rp. 202.050.719.099,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	Rp 31.976.533.528,00	Rp. 50.438.568.926,38
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 8.199.399.144,00	Rp. 10.657.004.004,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 5.996.278.246,00	Rp. 5.933.719.708,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 117.644.052.745,56	Rp. 24.485.269.756,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Transfer</b>	<b>Rp 1.277.720.437.034,00</b>	<b>Rp. 254.786.491.007,00</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.195.160.035.030,00	Rp. 1.223.542.473.104,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 82.560.402.004,00	Rp. 106.162.021.940,97
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>Rp 34.566.044.452,00</b>	<b>Rp. 135.021.426.460,62</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp 2.917.639.445.874,12</b>	<b>Rp. 2.013.077.694.005,97</b>

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2023, Pendapatan Daerah mencapai **Rp. 2.013.007.694.005,97**

## 2. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2023 telah merencanakan Belanja Daerah sesuai dengan urgensi capaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang termuat didokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang menjabarkan bahwa arah kebijakan Belanja Daerah berfokus pada:

- Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penguatan Kelembagaan
- Lain-lain dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

Adapun struktur belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.38

**Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023**

No	Uraian	Realisasi 2023
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	Rp. 1.008.535.350.706,00
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 593.071.331.841,00
2.1.2	Belanja Barang	Rp. 76.482.281.231,00
2.1.5	Belanja Hibah	Rp. 12.396.578.154,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 422.500.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	Rp. 315.870.824.632,00
2.2.1	Belanja Tanah	Rp. 266.858.900,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 27.384.390.682,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 118.004.695.772,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 169.416.302.978,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.015.435.200,00
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	Rp. 4.139.871.200,00
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>	Rp. 1.329.704.495.044,97
<b>Total Belanja</b>		<b>Rp. 3.656.710.916.432.97</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi komponen Belanja pada tahun 2023 mencapai Rp. 3.656.710.916.432.97 dimana angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2022. Secara lebih jelas terlihat dalam table di atas.





## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024, dokumen RKPD 2023, Review IKU Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023 serta Perubahan Perjanjian Kinerja 2023. Dalam laporan ini mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang terdiri atas 10 Misi dan 13 sasaran. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran- sasaran pada tiap-tiap Misi pada RPJMD dikategorikan **Baik**. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah;
3. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat;
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Meningkatkan Akseibilitas dan Konektifitas Wilayah;
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman;
7. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Menurunkan angka kriminalitas;
10. Meningkatkan Kemadirian Desa;
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industry pengolahan;
12. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
13. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana.

### 4.2. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:





1. Review RPJMD
2. Review Renstra OPD
3. Penyusunan RKPD 2023
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan disesuaikan dengan program prioritas mengacu kepada Visi dan Misi Bupati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu.

Belopa, 15 Maret 2024

**Pj. BUPATI LUWU**



**MUH, SALEH**

